

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang akan menuju pada tahap negara maju, sehingga negara sering kali melakukan pembangunan di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang sejahtera, terutama di kawasan ibu kota negara, yaitu Jakarta. Pada akhir tahun 2025, Jakarta menyentuh setidaknya 41,9 juta jiwa berdasarkan data dari PBB yang dihitung berdasarkan aktivitas harian masyarakat. Hal ini memperlihatkan tingginya tekanan pada ruang kota sebagai pusat aktivitas, baik pemerintah, ekonomi, dan sosial.¹ Tekanan ini juga diperparah oleh kondisi ekonomi negara yang belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja dengan baik. Angka pengangguran terbuka di wilayah Jakarta pada bulan November 2025 mencapai angka 349 ribu orang.² Tidak terserapnya masyarakat di sektor formal membuat banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk bekerja di sektor informal yang dianggap mudah dijangkau, terutama pada kondisi kota yang terus menerus mengalami perubahan.

Sektor informal tumbuh dan berkembang di perkotaan dengan berbagai perubahan yang terjadi. Sektor ini memiliki karakteristik berupa kegiatan yang tak terorganisir, sebagai usaha yang mandiri, tidak memiliki aturan yang jelas, dan biaya operasional yang berasal dari sumber yang tidak resmi.³ Sektor informal mampu menampung tenaga kerja dengan mudah karena persyaratan pendidikan dan keterampilan yang sederhana, fasilitas yang tidak terlalu rumit, lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, dan modal kerja. Di Jakarta, sektor informal

¹ IDN Financials, *Jakarta World's Largest City? Tokyo Drops*, diakses 1 April 2026, dari <https://www.idnfinancials.com/id/videos/watch/2093/jakarta-worlds-largest-city-tokyo-drops>

² Dr. Kadamanto M. A, *Rilis Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Tanggal 5 Februari 2026*, diunggah oleh BPS DKI JAKARTA, 5 Februari 2026, Video Youtube, 1:58:13, youtube.com.

³ Johara. T Jayadinata. (1986). *Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan, perkotaan dan wilayah*. Penerbit ITB.

mengalami kenaikan yang cukup tinggi selepas terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 akibat PHK yang masih terlalu banyak.⁴ Sehingga pada akhirnya, pekerjaan informal ini menjadi pilihan mereka sebagai ruang baru guna menyelamatkan kehidupan di perkotaan. Tahun 2025, Sekitar 58-60% angkatan kerja di Indonesia berasal dari sektor informal.⁵ Selain itu juga, sektor informal menyumbang setidaknya sekitar 23,7% pada PDB PPP (*Purchasing Power Parity*).⁶ Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk dari sektor informal yang perkembangannya cukup pesat di kawasan perkotaan. Keberadaan mereka memberikan dampak penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat kota, baik aspek ekonomi, kuliner, pariwisata perkotaan, dan tata ruang kota.⁷ Sehingga keberadaan mereka telah menjadi satu dalam kehidupan masyarakat dan sebagai aktor penting.

Kota akan mengalami perkembangan secara terus-menerus, sehingga pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut akan ikut meningkat dan mendorong penataan ruang kota yang lebih terstruktur. Diantara kawasan-kawasan strategis di Jakarta, Pasar Minggu hadir sebagai salah satu wilayah dengan kegiatan yang kompleks. Kawasan ini ditunjang oleh fasilitas yang cukup lengkap, baik dari swalayan besar, pasar tradisional, terminal bus, stasiun, moda transportasi lainnya, rumah sakit, gor olahraga, dan lain-lainnya. Titik Stasiun Pasar Minggu ini berseberangan dengan terminal dan pusat perdagangan di wilayah Pasar Minggu sehingga mendorong kawasan ini menjadi titik integrasi antar moda dan sebagai pusat pergerakan masyarakat. Selain itu, Stasiun Pasar Minggu dikelilingi oleh pemukiman warga dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Tingginya aktivitas sosial ekonomi di kawasan Stasiun Pasar Minggu ini mendorong ruang di kawasan ini terus mengalami proses penataan. Setiap intervensi yang dilakukan untuk tata ruang kota bukan hanya berdampak pada perubahan fisik saja, melainkan pola

⁴ Muhammad Hayat. *Strategi Bertahap Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL)*. Sosiologi Reflektif

⁵ World Economics. *Indonesia Informal Economy Size*. World Economics. Diakses 1 April 2026. <https://www.worldeconomics.com/Informal-Economy/Indonesia.aspx>

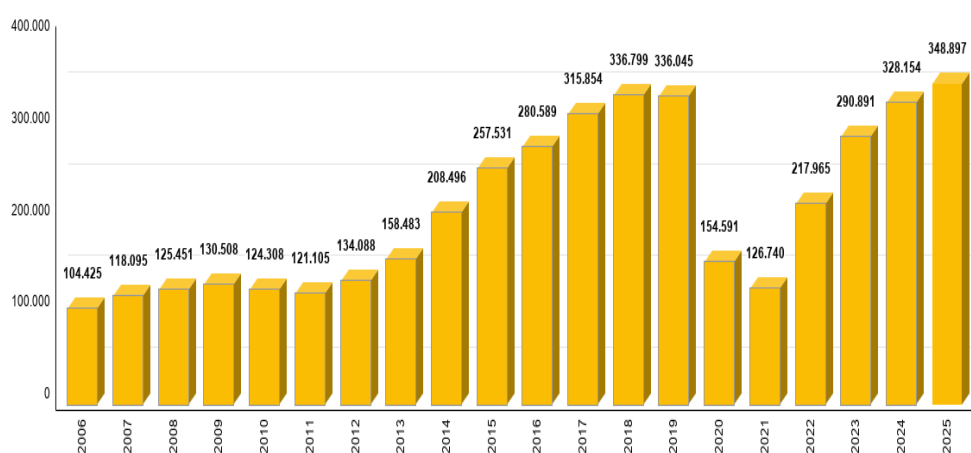
⁶ *Ibid.*

⁷ Joses Gandhi, Mieke Choandi. *Pemanfaatan Ruang Publik Kota Oleh Pkl Dari Sudut Pandang Arsitektur Empati*. Jurnal Stupa Sains, teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur, Vol.6 No. 1 hlm. 312. (2024)

aktivitas masyarakat dan kepentingan dari berbagai aktor lain dalam menggunakan ruang ini ikut berubah, terutama sektor informal.

Pasar Minggu mengalami peningkatan fungsi sosial ekonomi akibat dibangunnya sebuah sistem transportasi kereta api Batavia-Buitenzorg.⁸ Munculnya sistem transportasi kereta api di Pasar Minggu memberikan dampak besar pada wilayah Batavia. Melalui sistem transportasi kereta api dan perkembangan perkebunan buah di Pasar Minggu, menjadikan wilayah ini sebagai penyangga Batavia kala itu. Perkembangan pesat pada sektor transportasi publik, terutama dengan kemajuan *Commuter Line* di wilayah Jabodetabek, juga membawa dampak signifikan terhadap perubahan sosial-ekonomi di sekitar stasiun, termasuk Stasiun Pasar Minggu. Kemajuan transportasi di wilayah Pasar Minggu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik, sehingga aktivitas yang ada di wilayah sekitar Stasiun Pasar Minggu ikut mengalami perubahan.

Gambar 1. 1 Grafik Penumpang Kereta Api Jabodetabek



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2026.

Kawasan perkotaan, yaitu Jakarta, mengalami peningkatan aktivitas transportasi yang dapat dilihat pada grafik pertumbuhan jumlah penumpang kereta api di wilayah Jabodetabek sebagai satu kesatuan pada sistem transportasi.

⁸ Asep Suryana, *Pasar Minggu Tempo Doeloe: Dinamika Sosial Ekonomi Petani Buah 1921–1966* (Jakarta: LIPI Press, 2012)

Berdasarkan data yang ada, sekitar tahun 2006–2012 angka pengguna kereta api masih mengalami fluktuasi. Angka peningkatan pengguna kereta api di wilayah Jabodetabek dimulai pada tahun 2013, walaupun pernah mengalami kondisi penurunan di tahun 2020-2021 akibat dari Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2022-2025 pengguna kereta api Jabodetabek mulai mengalami peningkatan kembali. Kondisi ini menunjukkan semakin tinggi nya mobilitas masyarakat dan aktivitas di kawasan Stasiun, termasuk Stasiun Pasar Minggu.

Meningkatnya mobilitas penduduk juga ikut mendorong Pemerintah dan PT KAI untuk mengembangkan kawasan stasiun dengan menggunakan pendekatan Transit Oriented Development (TOD). Konsep TOD merupakan strategi pengembangan ruang yang bertujuan mengintegrasikan sistem angkutan umum dengan pemanfaatan lahan di kawasan sekitarnya. Melalui konsep ini, kawasan stasiun tidak lagi dipandang sekadar sebagai titik peralihan moda transportasi, melainkan dikembangkan menjadi pusat aktivitas perkotaan yang lebih mengintegrasikan transportasi, pusat perbelanjaan, layanan, dan ruang publik. Dengan demikian, perencanaan kawasan stasiun merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat, sekaligus menciptakan kawasan yang lebih aman, nyaman, dan bernilai ekonomi lebih tinggi.

Di kawasan Stasiun Pasar Minggu, konsep TOD terlihat jelas dalam revitalisasi kawasan stasiun, yang mencakup perancangan ulang trotoar, perbaikan akses pejalan kaki, tata lalu lintas baru, serta pemulihan penggunaan lahan di sekitar stasiun. Namun, proses revitalisasi ini tidak hanya membawa perubahan pada aspek fisik kawasan saja, melainkan juga mengubah cara berbagai pemangku kepentingan menggunakan ruang tersebut, yang sebelumnya telah menempatkan aktivitas ekonomi mereka di dekat stasiun, terutama para PKL. Dengan demikian, renovasi ini tidak hanya menjadi bagian dari modernisasi transportasi perkotaan, tetapi juga memperkenalkan dinamika baru dalam pemanfaatan ruang publik antara sektor formal dan informal.

Pada tahun 2012 sampai tahun 2013, sesuai grafik yang ada, pengguna kereta api Jabodetabek mengalami peningkatan sekitar 5.605 ribu penumpang. Keadaan ini juga memperlihatkan kondisi di lapangan Stasiun Pasar Minggu sebelum dilakukan revitalisasi pada tahun 2012 sampai awal tahun 2013. Pada tahun 2013, kawasan Stasiun Pasar Minggu masih dipenuhi oleh aktivitas pedagang kaki lima yang menempati ruang publik di sekitar stasiun. Mobilitas yang tinggi di kawasan ini mendorong aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan ruang di sekitar stasiun.

Kawasan Stasiun Pasar Minggu sebelum dilakukan revitalisasi memiliki kondisi dengan tingginya intensitas aktivitas di depan Stasiun Pasar Minggu sehingga tercipta pemanfaatan ruang yang lebih luas, termasuk pelaku sektor informal, seperti pedagang kaki lima. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pedagang kaki lima di wilayah Pejaten Timur yang mencakup wilayah Stasiun Pasar Minggu pada tahun 2013, yaitu sebelum revitalisasi, mencapai 247 pedagang.⁹ Pedagang kaki lima berkembang sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi dan kemiskinan kota. Oleh karena itu, sektor ini menjadi pekerjaan yang mudah untuk dilakukan.¹⁰

Hadirnya Pedagang Kaki Lima memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah, namun kehadirannya juga memberikan dampak pada ruang kota. Dalam penelitian tentang Pedagang Kaki Lima di Semarang oleh Eko Handoyo, bahwa ditemui di Jalan Kartini dan Jalan Pahlawan (sebelum relokasi pemerintah) makin padat dan ruwet karena banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di bahu jalan tersebut.¹¹ Selain itu, penelitian Joses Gandhi dan Mieke Choandi tentang Pemanfaatan Ruang Publik Kota oleh Pkl dari Sudut Pandang Arsitektur Empati mengatakan stigmatisasi

⁹ Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan, *Kecamatan Pasar Minggu Dalam Angka 2014*, Jakarta: BPS Kota Jakarta Selatan. (2014)

¹⁰ Joses Gandhi, Mieke Choandi. *Pemanfaatan Ruang Publik Kota Oleh Pkl Dari Sudut Pandang Arsitektur Empati*. Jurnal Stupa Sains, teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur, Vol.6 No. 1 hlm. 312. (2024)

¹¹ Eko Handoyo, *Makna Ruang Publik Bagi Pedagang Kaki Lima: Studi tentang Resistensi terhadap Penggusuran*. Semarang: Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin dan Call for Papers. (2015)

Pedagang Kaki Lima yang memberikan efek lingkungan, seperti kebersihan, keamanan, ketertiban, kemacetan, dan aspek estetika ruang kota.¹² Dalam kondisi ini, sebelum adanya revitalisasi, fungsi ruang mengalami perubahan, di mana jalur pejalan kaki menjadi terbatas. Dengan demikian, hal ini memperlihatkan bahwa ruang kota bukan hanya sebagai ruang mobilitas masyarakat, tetapi juga sebagai ruang ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pedagang kaki lima.

Para PKL mendiami sebuah kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi guna usaha mereka dalam mendekatkan diri pada konsumen.¹³ Bersamaan dengan itu, kawasan Pasar Minggu ini juga mengalami stigmatisasi ruang bahwa kawasan ini mengalami penurunan daya tarik yang cukup signifikan akibat keberadaan kaki lima, angkutan liar, dan infrastruktur yang tidak teratur.¹⁴ Selain itu juga, infrastruktur yang digunakan sebagai mobilitas masyarakat kehilangan fungsinya karena sempit, rusak, dan tidak memadai sehingga menambah persoalan baru dan memperparah stigma ruang pada wilayah ini.¹⁵ Hal ini memperlihatkan bahwa banyak kepentingan dari berbagai sektor yang saling beririsan sehingga cenderung diperebutkan oleh berbagai faktor kepentingan.

Kawasan Stasiun Pasar Minggu merupakan kawasan dengan nilai strategis yang tinggi karena keberadaannya berada di titik pusat masyarakat, meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan Ramayana, terminal, dan juga di tengah permukiman masyarakat. Titik ini mendorong kawasan Stasiun Pasar Minggu, bukan hanya sebagai ruang mobilitas masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang ekonomi. Keadaan ini akhirnya memunculkan berbagai kepentingan dalam memanfaatkan ruang publik, baik dari sektor formal, yaitu pemerintah daerah dan badan swasta (PT. KAI), maupun dari sektor informal, yaitu pedagang kaki lima

¹² Joses Gandhi, Mieke Choandi. *Pemanfaatan Ruang Publik Kota Oleh Pkl Dari Sudut Pandang Arsitektur Empati*. Jurnal Stupa Sains, teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur, Vol.6 No. 1 hlm. 312. (2024)

¹³ Eko Handoyo, *Makna Ruang Publik Bagi Pedagang Kaki Lima: Studi tentang Resistensi terhadap Pengusuran*. Semarang: Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin dan Call for Papers. (2015)

¹⁴ Asep Suryana. *Op.cit.*

¹⁵ Fernando Cunnores, Doddy Yuono. *Penataan Kembali Kawasan Pasar Minggu dengan Penerapan Konsep Transit Oriented Development*. Jurnal Stupa Sain Teknologi Urban, Perancangan, Arsitektur, Vol. 6 No. 2, hlm.984 (2024)

yang melihat kawasan ini cukup ramai untuk dilalui masyarakat. Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai pengelola ruang publik bersama PT. KAI memiliki kewenangan dalam mengelola area stasiun yang berbatasan langsung dengan trotoar (ruang publik). Dengan demikian, ruang ini menjadi kawasan yang diproduksi dan diperebutkan oleh berbagai aktor dengan tujuan yang berbeda-beda.

Respons terhadap keadaan pemanfaatan ruang Stasiun Pasar Minggu tahun 2012 sampai awal 2013 membuat kawasan ini menjadi objek revitalisasi sebagai bagian dari upaya penataan dan peningkatan kualitas kawasan. Pada pertengahan tahun 2013, akhirnya dilakukan revitalisasi pada muka Stasiun Pasar Minggu untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna stasiun. Selain itu, kawasan ini ditata untuk memperlihatkan perubahan fungsi ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Sehingga dalam prosesnya, pemerintah daerah bersama PT. KAI memiliki peran penting dalam mengatur kembali kawasan ini sehingga pemanfaatan ruang di kawasan Stasiun Pasar Minggu lebih terstruktur.

Namun, dalam proses kebijakan ini, tidak dilakukan secara penuh dengan netral antara sektor formal dan informal. Kebijakan ini membawa dampak yang besar terhadap kelompok marginal, yaitu pelaku ekonomi sektor informal. Pedagang kaki lima yang sebelumnya beraktivitas di kawasan stasiun mengalami perubahan dalam pemanfaatan dan akses ruang, sehingga jumlah PKL di kawasan ini berkurang. Adanya pergeseran, di mana ruang yang sebelumnya dimanfaatkan oleh sektor informal menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, perubahan kawasan Stasiun Pasar Minggu tidak hanya berdampak pada aspek fisik, melainkan juga memperlihatkan adanya *accumulation by dispossession*.

Keadaan ini dapat dilihat melalui pandangan David Harvey mengenai ruang kota. Ruang kota merupakan ruang yang tidak bersifat netral, tetapi hasil dari proses produksi yang diatur oleh berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kawasan Stasiun Pasar Minggu bukan hanya diartikan sebagai tempat aktivitas masyarakat saja, melainkan sebuah kawasan yang diatur dan dibentuk sesuai kepentingan pemegang kekuasaan. Perubahan kawasan ini memperlihatkan adanya

pengaturan kembali terhadap hak dan akses masyarakat dalam kawasan perkotaan. Dengan demikian, revitalisasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan dalam tata ruang kota membawa pengaruh pada berbagai aktor yang memanfaatkan ruang.

Banyaknya penelitian cenderung melihat revitalisasi kawasan kota hanya berfokus pada bangunan fisik dan infrastruktur kota saja, tanpa melihat bahwa kebijakan ini berpengaruh pada kelompok marjinal, yaitu pedagang kaki lima. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa revitalisasi yang terjadi di Stasiun Pasar Minggu bukan hanya terjadi secara alamiah, tetapi sebuah proses produksi ruang yang menghasilkan ketimpangan yang ada, terutama PKL sebagai kelompok marjinal yang akses ruangnya dicabut. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, peneliti ingin membahas secara mendalam bagaimana kebijakan revitalisasi Stasiun Pasar Minggu berkaitan dengan sektor informal, yaitu pedagang kaki lima. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul **“Informalitas Pedagang Kaki Lima dan Reproduksi Ruang Pasca Revitalisasi Stasiun Pasar Minggu”**.

1.2 Permasalahan Penelitian

Konflik pada wilayah Stasiun Pasar Minggu hadir karena perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang di tengah padatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Ruang di wilayah ini digunakan oleh berbagai aktor kepentingan dengan fungsi yang berbeda-beda, baik sebagai sarana mobilitas maupun ekonomi. Akhirnya dilakukan sebuah revitalisasi yang menciptakan perubahan dalam aturan penggunaan ruang yang berdampak pada pergeseran hak dan akses bagi para pengguna ruang. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan dalam pemanfaatan ruang publik di kota, termasuk bagaimana ruang diakses, digunakan, dan diatur oleh berbagai aktor dalam kawasan ini. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana mekanisme *accumulation by dispossession* di Stasiun Pasar Minggu?

- b. Bagaimana transformasi reproduksi ruang akibat revitalisasi Stasiun Pasar Minggu?
- c. Bagaimana ketidaksetaraan terjadi pada sektor ekonomi informal pasca revitalisasi Stasiun Pasar Minggu?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan permasalahan penelitian di atas, terhadap tujuan dalam penyusunan makalah ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme *accumulation by dispossession* di Stasiun Pasar Minggu sebagai bentuk perampasan atas akumulasi modal yang terjadi.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi reproduksi ruang publik akibat revitalisasi Stasiun Pasar Minggu.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketidaksetaraan ruang yang terjadi pada sektor ekonomi informal pasca revitalisasi Stasiun Pasar Minggu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan terhadap revitalisasi yang terjadi dalam sektor informal pedagang kaki lima di wilayah Stasiun Kereta Api Pasar Minggu dan apa saja mekanisme yang memicu terjadinya perubahan di kawasan tersebut.
- b. Menambah literatur akademik terhadap pedagang kaki lima di tengah globalisasi dan modernisasi perkotaan.
- c. Memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait hubungan yang terjadi antara pembangunan kota dan perubahan tata ruang dengan kelompok kecil, PKL.

1.4.2 Manfaat Praktis

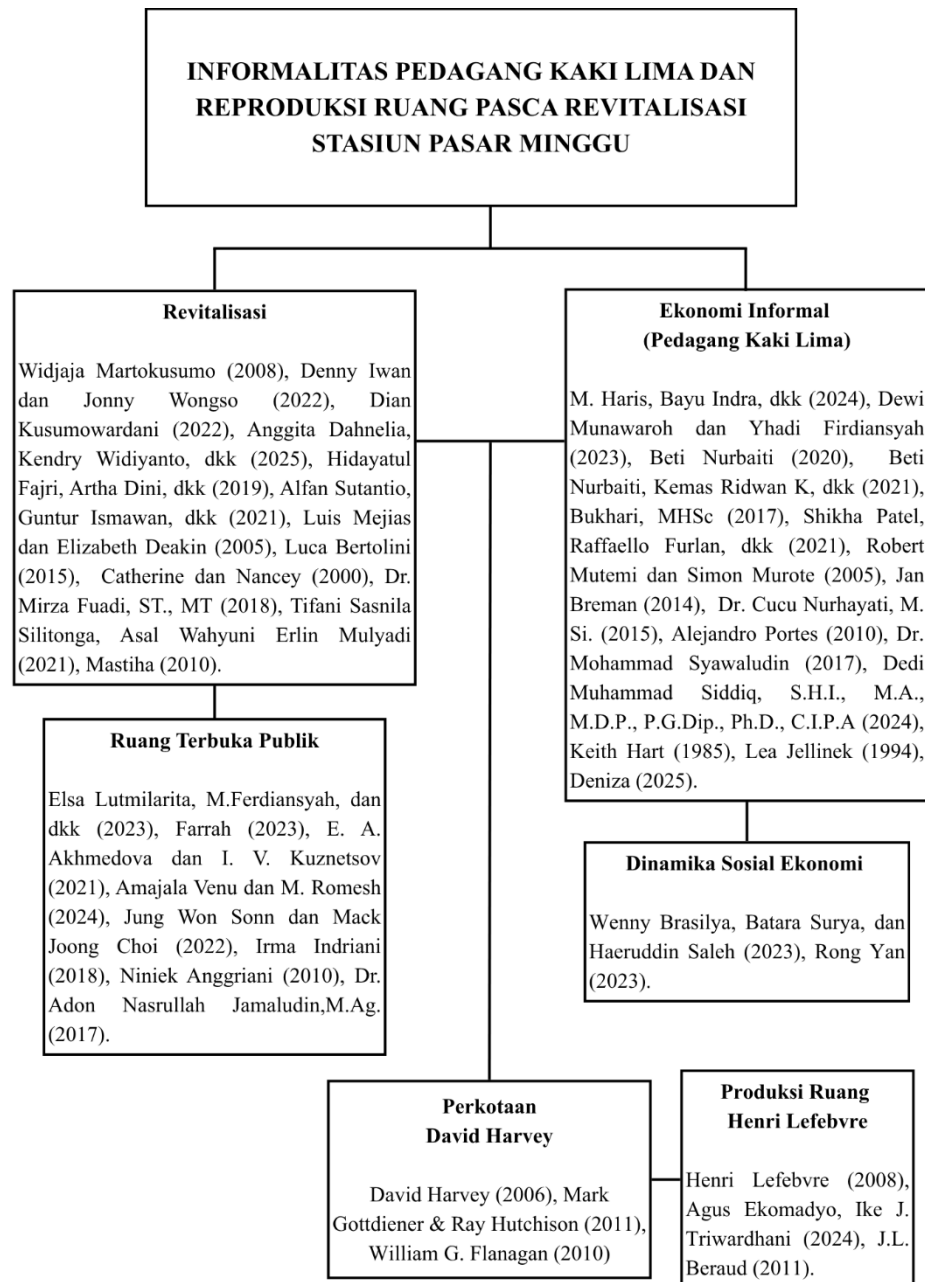
- a. Hasil penelitian dapat menjadi data analisis evaluasi kebijakan pemerintah dan pembangunan kota supaya lebih inklusif.
- b. Hasil penelitian ini bisa menjadi suatu referensi atau kajian literatur dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian melakukan tinjauan melalui berbagai sumber penelitian sejenis yang berasal dari berbagai macam tulisan, baik dari jurnal penelitian nasional dan internasional, buku, maupun bahan bacaan elektronik yang dapat membantu peneliti dalam proses penyusunan penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka yang telah dikumpulkan terdiri dari dua belas jurnal nasional, tiga belas jurnal internasional, dan empat belas buku. Studi literatur ini dibagi menjadi beberapa bagian yang dianggap sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan, yaitu Revitalisasi, Ruang Terbuka Publik, Ekonomi Informal (Pedagang Kaki Lima), dan Dinamika Sosial Ekonomi. Adapun studi literatur tambahan guna memperkuat teori yang digunakan sebagai acuan peneliti dalam menulis penelitian ini, yaitu Modal Accumulation David Harvey dan teori pendukung, yaitu Produksi Ruang Henri Lefebvre.

Intelligentia - Dignitas

Tabel 1.1 Literatur Sejenis



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Studi literatur ini dimulai pada pokok bahasan revitalisasi. Dalam literatur sejenis yang ditulis oleh Widjaja Martokusumo, Denny Iwan Setyawan, Jonny

Wongso¹⁶, Dr. Mirza Fuady, ST., MT¹⁷ mengatakan bahwa kegiatan revitalisasi muncul dari sebuah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah kawasan yang mulai menurun. Selain itu, Revitalisasi juga berangkat dari bagaimana aktivitas dalam kawasan tersebut bisa dihidupkan kembali atau diperbaharui.¹⁸ Revitalisasi kawasan diawali dari permasalahan dasar terkait hidup (vital) fungsi kawasan tersebut, yaitu berpusat kepada manusia (*people*) yang beraktivitas di dalamnya. Ruang perlu di-(re)produksi untuk memecah halangan pergerakan dan keterbatasan ruang publik.¹⁹ Pada tingkat perencanaan dan perancangan, *redevelopment* atau pembangunan kembali melibatkan upaya di dalam merumuskan kebijakan pembangunan kota yang menyangkut proses dan prosedur reorganisasi dari unsur-unsur tata ruang kota.²⁰

Dalam literatur sejenis yang ditulis oleh Bertolini²¹ dan Dian Kusumowardhani²² memperlihatkan bahwa dalam melakukan revitalisasi perlu adanya persiapan yang baik. Melakukan revitalisasi di sebuah wilayah, terutama stasiun kereta api harus dikaji secara menyeluruh karena memiliki dua peran, sebagai node (simpul transportasi) dan place (tempat sosial ekonomi sehari-hari) karena lokasi stasiun dipengaruhi oleh dinamika global, seperti integrasi sistem transportasi, jaringan lokal, kondisi kebutuhan masyarakat, dan aktivitas ekonomi informal.²³ Revitalisasi juga harus menyesuaikan dengan prinsip yang ada, salah satunya TOD, yaitu penataan kawasan yang berorientasi pada pejalan kaki, sepeda,

Intelligentia - Dignitas

¹⁶ Denny Iwan, Jonny Wongso. *Reproduksi Ruang Dalam Upaya Revitalisasi Blok Eks "Bioskop Ria" di Kawasan Perdagangan "Pasar" Kota Jambi*. Jurnal Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol.6 No.1 (2022) hlm. 15-26

¹⁷ Dr. Mirza Fuadi, ST., MT, *Revitalisasi Kawasan Kota* (Banda Aceh: Graha Tria, 2018).

¹⁸ Denny Iwan, Jonny Wongso. *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dr. Mirza Fuadi, ST., MT, *Ibid.*

²¹ Luca Bertolini, "Nodes and Places: Complexities of Railway Station Redevelopment," *European Planning Studies*, Vol. 4 no. 3 (1996) hlm. 331-345,

²² Dian Kusumowardani, *Penerapan Prinsip Prinsip Tod Pada Revitalisasi Kota Tua Jakarta*. Jurnal Ismetek 14 No. 2. (2022).

²³ Luca Bertolini, *Ibid.*

dan transportasi publik sesuai dengan penelitian yang dikatakan oleh Dian Kusumowardani.²⁴

Keberhasilan revitalisasi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, desain ruang, dan fleksibilitas regulasi, tanpa pengaruh tersebut potensi pengembangan yang dilakukan tidak akan berjalan secara maksimal yang dikatakan oleh penelitian Luis Mejias dan Elizabeth Deakin.²⁵ Selain itu, Catherine L. Ross dan Nancey Green Leigh²⁶ memperlihatkan bahwa tanpa adanya pandangan yang adil dan inklusif, maka perencanaan kota akan menjadi alat peminggiran suatu kelompok. Sehingga revitalisasi bukan hanya sekedar bangunan fisik dan ekonomi saja, melainkan adanya ketimpangan struktural yang membentuk sebuah produksi ruang kota. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama antara seluruh elemen masyarakat untuk mengoptimalkan keberhasilan revitalisasi yang dilakukan guna kepentingan seluruh pihak terkait. Perspektif adil dan inklusif juga dibutuhkan guna membentuk sebuah produksi ruang kota yang optimal.

Dalam studi literatur sejenis dari penelitian Anggita, Kendry, Hasan²⁷ dan Alfian, Guntur,²⁸ bahwa intervensi pemerintah pada program revitalisasi bertujuan untuk menata ulang kota agar lebih tertib dan fungsional. Proses revitalisasi yang dilakukan ini memberikan perubahan yang signifikan, baik dari fisik, sosial, maupun ekonomi. Produksi ruang kota tidak hanya berfokus pada bangunan fisik saja, melainkan banyak sektor yang terdampak. Kawasan yang dibangun berdasar dan berorientasi pada masyarakat akan menghasilkan produk

²⁴ Dian Kusumowardani, *Ibid*.

²⁵ Luis Mejias dan Elizabeth Deakin, *Redevelopment and Revitalization Along Urban Arterials: Case Study of San Pablo Avenue, California, from the Developers' Perspective*, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 1902 (2005) hlm. 26–34.

²⁶ Catherine L. Ross dan Nancey Green Leigh, *Planning, Urban Revitalization, and the Inner City: An Exploration of Structural Racism*, Journal of Planning Literature Vol. 14, no. 3 (2000)

²⁷ Anggita Dahnelia, M. Kendry Widiyanto, dan Hasan Ismail, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Revitalisasi dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Rakyat di Kota Surabaya*, PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 5 no. 1 (2025) hlm. 194–205.

²⁸ Ifan Sutantio, Guntur Ismawan, M Arifandy, dkk. *Dampak Relokasi Terhadap Perubahan Ruang Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Permukiman Kalijodo Di Jakarta*. Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 13, No. 1. (2021)

pembangunan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga.²⁹

Pelaksanaan revitalisasi memiliki beberapa dampak ekonomi, mulai dari penjualan, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja sesuai dengan indikator direct effect menurut Stynes, 1999 pada penelitian Tifani Sasnila Silitonga, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi³⁰. Adapun indikator dampak sosial yang hadir pada pelaksanaan sebuah revitalisasi pada penelitian Mastiha, yaitu menyangkut aspek-aspek relasi dan interaksi sosial dari para pedagang, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini berlaku dalam tatanan struktural maupun kultural dengan elemen sosial lainnya yang menyangkut berjalannya kehidupan ekonomi dan lain-lainnya.³¹

Pembangunan kota seringkali mengubah fungsi dan penggunaan ruang secara signifikan. Ruang publik yang digunakan secara bebas oleh berbagai kelompok, kini cenderung terstruktur, modern, dan memiliki kepentingan pembangunan.³² Perencanaan tata ruang adalah bentuk kesepakatan publik yang sifatnya mengikat yang diputuskan secara bersama melalui proses politik dan setelahnya menjadi kebijakan publik yang wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan.³³ Paradigma baru perancangan kota harus mempertimbangkan aspek globalisasi, desentralisasi, demokrasi, dan sistem pemerintahan.³⁴ Wilayah di sekitar stasiun berkembang menjadi ruang yang elit dan teratur tetapi tidak disadari malah membatasi akses bagi kelompok berpenghasilan rendah sehingga tidak lagi sepenuhnya inklusif karena dominasi kelompok tertentu dan kepentingan ekonomi.³⁵ Perlu adanya proses pembentukan aturan dan kebijakan partisipatif

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Tifani Sasnila Silitonga dan Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, *Analisis Dampak Ekonomi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta)*, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol.1, no. 2 (2021) hlm. 398–415.

³¹ Annisa Indah Masitha. *Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pedagang*. Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.2 No.1 (2010)

³² Amajala Venu Gopal and M. Romesh Singh. *Development-induced Changes in the 'Urban Landscape' and 'Social Space': A Case Study of Metro Rail's Impact on the Hyderabad City*. Journal of the Anthropological Survey of India 73(1) (2024) hlm. 29–43,

³³ Niniek Anggriani. *Ruang Publik dalam Perancangan Kota* (Klaten: Yayasan Humaniora, 2010), hlm.2

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Amajala Venu Gopal and M. Romesh Singh. *Ibid.*

sehingga nantinya akan menghasilkan penataan dan pemanfaatan tanah dan ruang yang berwawasan lingkungan.³⁶

Tujuan utama dalam penyelenggaraan penataan ruang berkelanjutan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam proses pembangunannya harus berpegang pada prinsip keberlanjutan (*Sustainable development*).³⁷ Pengelola pembangunan kota lebih menciptakan sebuah ruang indah dengan memanfaatkan teknologi tinggi padahal kenyataannya perlu terciptanya kota yang demokratis, manusiawi, dan kepekaan.³⁸ Penataan kota seharusnya tidak hanya fokus pada keindahan, tapi juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan PKL agar lebih adil dan tidak merugikan mereka. Dengan adanya konfirmasi atas kondisi kerentanan mereka, menciptakan mekanisme dan pembangunan ruang kota modern serta inklusif.³⁹ Keterlibatan pada semua pihak, yaitu warga, pelaku pembangunan, dan arsitek merupakan hal penting sebagai fungsi komunikatif yang strategis.⁴⁰ Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mengoptimalkan dampak positif pembangunan infrastruktur kota karena keterlibatannya berguna untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dan sektor Pemerintah wajib menegakkan ketertiban penggunaan pedestrian.⁴¹

Perencanaan spasial dalam sebuah pembangunan memiliki lima karakteristik, yaitu negara melihat wilayah sebagai alat produksi dan bukan sebagai lingkungan hidup, kebijakan lokasi industri sesuai dengan kebutuhan pasar, perencanaan spasial diatur dan dipengaruhi lembaga ekonomi elit yang

³⁶ Irma Indriani, *Ruang Publik Yang Termarginalkan*. (Lhokseumawe: Unimal Press, .2018)

³⁷ Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, M.A. *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 107.

³⁸ *Ibid.* hlm. 109.

³⁹ Farrah Eva Nabila, *Dialektika Spasial Dan Produksi Beautifikasi Ruang Kota Terhadap Pelaku Aktivitas Ekonomi Informal*, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 12 No.2 (2023) hlm. 431- 464.

⁴⁰ E. A. Akhmedova dan I. V. Kuznetsov. *City-planning transformation of the functional and planning structure of districts near a railway station in the largest megalopolises (international experience)*. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 944 (2020)

⁴¹ Elsa Lutmilarita Amanatin, Muhammad Fedryansyah, dan Nunung Nurwati, *Implikasi Pembangunan Pedestrian di Jalan Pancasila Kota Tegal: Kontroversi Pemanfaatan Trotoar Pejalan Kaki dan Pedagang Kaki Lima*, RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual (2023) hlm. 237.

merumuskan kebijakan industri dan mengatur arus pasar, hubungan pemerintah cenderung terpisah dengan aktor ekonomi lokal, perencanaan spasial membuat perubahan sehingga ruang ikut menentukan arah ekonomi lokal.⁴² Ruang kota tidak dibentuk secara alami, melainkan diciptakan dalam sebuah kepentingan yang mampu mempengaruhi bagaimana masyarakat menggunakan ruang tersebut. Proses penataan ruang hanya diatur oleh pemerintah dan elite ekonomi saja, bukan dari kebutuhan masyarakat langsung sehingga terbentuk sistem “top-down”.⁴³

Pada studi literatur sejenis, penelitian oleh Muhammad Haris, Bayu Indra Laksana, Yefni,dkk⁴⁴, Jan Breman⁴⁵, Jung Won Sonn dan Mack Joong Choi⁴⁶, Shikha Patel, Raffaello Furlan, dan Michael Grosvald⁴⁷, Alejandro Portes⁴⁸, Dedi Muhammad Siddiq, S.H.I., M.A., M.D.P., P.G.Dip., Ph.D., C.I.P.A⁴⁹, mengatakan bahwa sektor informal penting. Dinamika sosial ekonomi sebuah wilayah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi mencakup perubahan dalam struktur, pola, dan interaksi sosial.⁵⁰ Pendapatan dan keberlanjutan pedagang kaki lima dipengaruhi oleh infrastruktur, peraturan pemerintah, dan perilaku konsumen.⁵¹ PKL memiliki peran yang penting sebagai ekonomi informal sebagai penyedia barang murah,

⁴² Jung Won Sonn dan Mack Joong Choi, “Reformulating the Developmental State Theory to Explain Chinese Spatial Planning,” *Transactions in Planning and Urban Research*, Vol. 1, No. 1–2 (2022), hlm. 86–98

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muhammad Haris, Bayu Indra Laksana, Yefni, dan Moralely Hendrayani, *Dinamika Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima*, Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa, Vol. 6 No. 2 (2024) hlm. 351.

⁴⁵ Jan Breman, *A Dualistic Labour System? A Critique of the ‘Informal Sector’ Concept: I: The Informal Sector*, *Economic and Political Weekly*, Vol. 11 No. 48 (1976), hlm. 1870–1876.

⁴⁶ Jung Won Sonn dan Mack Joong Choi, *Ibid.*

⁴⁷ Shikha Patel, Raffaello Furlan, dan Michael Grosvald, *A Framework for Enhancing the Spatial Urban Form of Informal Economies in India: The Case of Krishna Rajendra Market, Bangalore*, SAGE Open (2021).

⁴⁸ Alejandro Portes, *Economic Sociology* (London: Princeton University Press, 2010), hlm. 130-161

⁴⁹ Dedi Muhammad Siddiq, S.H.I., M.A., M.D.P., P.G.Dip., Pj.D., C.I.P.A, *Best Practice Manajemen Sektor Informal Di Perkotaan Lessons Learnt Penataan Pedagang Kaki Lima Di Yogyakarta* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2022)

⁵⁰ Muhammad Haris, Bayu Indra Laksana, Yefni, dan Moralely Hendrayani, *Dinamika Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima*, Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa, Vol. 6, No. 2 (2024) hlm. 351.

⁵¹ *Ibid.*

membuka lapangan kerja, dan sebagai penggerak ekonomi lokal.⁵² Bahkan PKL sebagai penyumbang sebagian besar aktivitas ekonomi di negara berkembang menurut studi literatur sejenis Shikha Patel, Raffaello Furlan, dan Michael Grosvald⁵³. Dengan demikian, sektor informal tidak bisa dilihat sebagai pasar bebas, tetapi bergantung pada struktur sosial berupa relasi dan kepercayaan.⁵⁴ Sektor informal memiliki dinamika yang kompleks, baik dalam bertahan hidup sampai kepada kegiatan yang produktif sehingga sektor ini hadir dan penting bagi negara berkembang.⁵⁵

Menurut studi literatur sejenis oleh Shikha Patel, Raffaello Furlan, dan Michael Grosvald⁵⁶ dan Muhammad Haris, Bayu Indra Laksana, Yefni,dkk⁵⁷ mengatakan bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh PKL, baik dari pemerintah maupun sosial ekonomi. Tantangan PKL hadir dari sektor pemerintah karena perencanaan kota yang sering kali tidak memperhatikan sektor informal dan tidak memiliki aturan ruang jelas bagi PKL sehingga mereka melakukan aktivitas ekonomi di tempat ilegal.⁵⁸ Tantangan lain yang berasal dari aspek sosial ekonomi adalah persaingan, lingkungan kerja tidak tertata, dan ketidakpastian lapak dagang.⁵⁹ Selain itu, penelitian oleh Jan Breman⁶⁰ mengatakan bahwa sektor ekonomi informal mencakup berbagai jenis pekerjaan, baik dari PKL, buruh lepas, dan pekerjaan tidak tetap lainnya yang cenderung memiliki pendapatan rendah dan tidak terlindungi oleh hukum. Walaupun begitu, sektor informal bukan sebagai bagian yang terpisah dari sistem ekonomi yang kompleks, cenderung sektor informal saling terhubung satu dengan yang lainnya.⁶¹ Kondisi Covid-19 juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi PKL. Kondisi ini menyebabkan adanya penurunan

⁵² *Ibid.*, hlm. 352

⁵³ Shikha Patel, Raffaello Furlan,dkk, *Ibid.*

⁵⁴ Alejandro Portes, *Ibid*, hlm. 130-161

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ M.Haris, Bayu Indra, Yefni,dkk, *Ibid.*

⁵⁸ Shikha Patel, Raffaello Furlan,dkk, *Ibid.*

⁵⁹ M.Haris, Bayu Indra, dkk, *Ibid.*

⁶⁰ Jan Breman, *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

pendapatan para pedagang, kesulitan ekonomi akibat sepi pembeli, gangguan pada kesejahteraan pendidikan anak-anak mereka, bahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.⁶²

Menghadapi tantangan yang mereka hadapi, PKL seringkali berinteraksi sesama pedagang. Modal sosial berkorelasi positif dengan kesejahteraan sebagai wujud dari ketahanan ekonomi di masyarakat yang lahir dari jaringan, kelompok akibat relasi kekerabatan atau keluarga atas kepercayaan individu dalam satu komunitas.⁶³ Modal sosial dalam wujud grup/kelompok dan jaringan sangat berperan penting dalam ketahanan sektor informal perkotaan. Modal sosial mampu membantu pekerja migran informal dari keterpurukan ekonomi dan bertahan hidup dengan berdagang tanpa mengandalkan pihak luar/lembaga formal keuangan.⁶⁴

Ketahanan ekonomi rumah tangga PKL di DKI Jakarta Pandemi Covid-19 dengan modal sosial antara PKL yaitu meminjam uang tanpa harus ke Bank atau lembaga keuangan lainnya.⁶⁵ Solidaritas sosial yang dilakukan meliputi meminjam modal, cara dan informasi berdagang, serta berbagai pengetahuan dan keterampilan berdagang.⁶⁶ Hubungan sosial antar PKL sangat erat dalam keberlangsungan usaha, Semua pihak, dari konsumen, keluarga, pedagang grosir, pemasok berperan dalam memberikan dukungan.⁶⁷ Hubungan dengan tengkulak, rentenir, sektor pemerintah/satpol PP/Penarik pajak hanya seadanya. Sedangkan organisasi/badan seperti P4A berperan dalam penengah konflik di kehidupan PKL Peunayong.⁶⁸

⁶² Dewi Munawaroh dan Yhadi Firdiansyah, *Perubahan Sosial Ekonomi Pedagang saat Pandemi di Pasar Induk Gadang Kota Malang*, *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 154–165.

⁶³ Beti Nurbaiti, *Kemampuan Ekonomi Pekerja Migran Pada Sektor Informal Perkotaan Melalui Modal Sosial: Studi Kasus Pada Komunitas Pedagang Kaki Lima Di Banjir Kanal Timur, Jakarta*, *Jurnal Intelijen & Kontra Inteljen*, Vol. VII. No.40 (2020), hlm. 120-128.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Beti Nurbaiti, Ridwan K, Mia Siscawati, Chotib,dkk, *Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Pedagang Kaki Lima DKI Jakarta di Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. VII No. 2, (Desember 2021)

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Bukhari, *Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi*, *Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala*, Vol. 11 No. 1 (2017), hlm. 76–87.

⁶⁸ *Ibid.*

Hubungan dan ikatan antara PKL terbilang. Studi literatur sejenis oleh peneliti Dr. Mohammad Syawaludin⁶⁹ melihat komunitas PKL muslim di pasar Suak Bato Palembang memanfaatkan hubungan komunitas sesama pedagang sehingga bisa meningkatkan capaian dan nilai kesejahteraan hidup mereka. Salah satu komunitas yang ada, yaitu komunitas pedagang kaki lima muslim dengan mewujudkan solidaritas mekanik lewat ikatan kultural.⁷⁰ Komunitas PKL muslim membantu PKL dalam mengatasi kelangkaan bahan dagang dan memperpendek jalur distribusi bahan.⁷¹ Hubungan sosial antar PKL yang di depan stasiun pasar minggu juga memiliki ikatan yang kuat dengan tantangan yang berbeda.

Walaupun demikian, kehadiran PKL juga memberikan pengaruh pada pembangunan di sebuah kota. Dalam literatur sejenis Robert Mutemi Kajiita dan Simon Murote Kang'ethe⁷² memperlihatkan bahwa hambatan utama pada pembangunan kota, salah satunya berasal dari kemiskinan di sektor ekonomi informal. Pembangunan kota terhambat akibat beberapa faktor, yaitu ekonomi informal, kurang partisipasi masyarakat, ketimpangan budaya, kriminalitas, dan urbanisasi yang tinggi sehingga meningkatkan kemiskinan, pengangguran, dan akhirnya menciptakan sebuah wilayah yang kumuh.⁷³ Dengan demikian, kehadiran PKL bukan semata-mata sebagai bagian yang mudah, melainkan hal kompleks yang wajib dikelola secara baik dan inklusif.

Kondisi PKL ini juga diperlihatkan di pasar tradisional, Pasar Minggu dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Cucu Nurhayati, M. Si.⁷⁴, bahwa penataan dan relokasi para PKL di Pasar Minggu dalam sudut pandang pembangunan sosial

⁶⁹ Dr. Mohammad Syawaludin, *Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dengan Pemanfaatan Hubungan Komunitas Pkl Muslim Di Pasar Suak Bato 26 Ilir Di Palembang* (Palembang: CV. Amanah, 2017)

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Robert Mutemi Kajiita dan Simon Murote Kang'ethe, "Socio-Economic Dynamics Inhibiting Inclusive Urban Economic Development: Implications for Sustainable Urban Development in South African Cities," *Sustainability*, Vol. 16 No. 2803 (2024).

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Dr. Cucu Nurhayati, M. Si., *Pembangunan Sosial Sektor Informal Perkotaan; (Studi Atas Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu DKI Jakarta)* (Jakarta: Orbit Publishing Jakarta, 2015)

belum berada pada tahap yang ideal. Penataan dan relokasi masih jauh dari pembangunan yang berdasar pada asas inklusif.⁷⁵ Peningkatan kualitas hidup PKL melalui pembangunan struktural belum tercapai, namun dalam konsep pembangunan kultur sosial sebagai masyarakat yang berkebudayaan adanya perubahan perilaku satpol PP dan aparat pemerintah yang lebih sopan dengan pendekatan persuasif.⁷⁶

Namun, ketika kebijakan pemerintah dapat melihat sektor informal penting maka akan menimbulkan perubahan baru di suatu wilayah. Studi literatur sejenis oleh peneliti Dedi Muhammad Siddiq, S.H.I., M.A., M.D.P., P.G.Dip., Pj.D., C.I.P.A.⁷⁷, memperlihatkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menata dan mengembangkan sektor informal. Pemerintah melakukan pemenuhan fasilitas dan membuka ruang dialog bersama para PKL sebagai tempat penyampaian pendapat dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menghasilkan peningkatan kualitas kehidupan kota dan memberikan rasa aman bagi PKL untuk menjalankan aktivitas ekonominya.⁷⁸ Dengan demikian, penting sekali para PKL dilibatkan dalam penataan tata ruang guna kesejahteraan seluruh pihak. Sektor informal sangat berperan terhadap ekonomi negara berkembang sehingga perlu adanya kerjasama yang baik, antara pemerintah, PKL, masyarakat, dan stakeholder terkait.

Peran sektor informal juga berpengaruh pada dinamika sosial ekonomi di sebuah wilayah. Dalam studi literatur sejenis oleh peneliti Wenny Brasilya, Batara Surya, dan Haeruddin Saleh⁷⁹ memperlihatkan bahwa dinamika sosial ekonomi merujuk pada perubahan pola hidup dan struktur masyarakat di suatu wilayah pada hal ini sektor informal menjadi bagian adaptasi sosial ekonomi masyarakat lokal terhadap arus industrialisasi. PKL menciptakan ruangnya sendiri akibat sektor

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Dedi Muhammad Siddiq, S.H.I., M.A., M.D.P., P.G.Dip., Pj.D., C.I.P.A, *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Wenny Brasilya, Batara Surya, dan Haeruddin Saleh, *Industrialisasi & Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat*, Editor: Syamsul Bahri dan Aslam Jumain (Makassar: Chakti Pustaka Indonesia, 2023)

formal yang tidak bisa memberikannya pekerjaan. Oleh karena itu, sektor informal secara tidak langsung memiliki hubungan yang erat dengan sektor sektor lainnya.

Pada studi literatur sejenis oleh Peneliti Rong Yan⁸⁰ ini menelaah sosial ekonomi yang berhubungan antara struktur sosial, norma budaya, perilaku individu, dan sistem ekonomi, yang semua berkontribusi pada realitas sosial-ekonomi masyarakat. Analisis sosial ekonomi dengan mempertimbangkan aspek ketimpangan, pasar kerja, kebijakan publik, dan globalisasi memberikan kontribusi yang optimal pada perumusan kebijakan yang efektif dan inklusif.⁸¹ Maka dari itu, perlu adanya penelitian ini guna kebutuhan dari seluruh elemen terkait, baik dari sektor pemerintah pusat, pemerintah daerah, keamanan setempat, organisasi masyarakat, dan juga masyarakat. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kajian baru guna keberlangsungan hidup masyarakat.

Di samping itu, penelitian ini mengkaji dari sudut pandang melalui teori *Modal Accumulation* dari David Harvey. Harvey berpendapat, bahwa kota sebagai tempat akumulasi modal dari proses pengumpulan keuntungan yang berulang lewat aktivitas ekonomi di perkotaan yang nantinya kota ini bersifat tidak stabil dan mengalami siklus pembangunan, kemunduran, dan pembangunan kembali karena modal yang berpindah.⁸² Lingkungan perkotaan dibangun, dan terus-menerus dihancurkan dan dibangun kembali, demi menciptakan arena yang lebih efisien untuk sirkulasi.⁸³ Selain itu, dalam masyarakat kapitalis modern, produksi tidak hanya terbatas pada barang, tetapi juga mencakup pengetahuan dan ide.⁸⁴

Teori David Harvey ini merupakan hasil pengembangan dari pemikiran

⁸⁰ Rong Yan, *The Importance of Socio-Economic Research: Unveiling the Dynamics of Human Progress in Societies and Economies*, Neuroscience and Psychiatry: Open Access 6, no. 3 (2023): 50–52,

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Mark Gottdiener dan Ray Hutchison, *The New Urban Sociology* (Boulder, CO: Westview Press, 2011), hlm.75-99

⁸³ William G. Flanagan, *Urban Sociology: Images and Structure* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2010), hlm. 256-265

⁸⁴ Noel Castree dan Derek Gregory, eds., *David Harvey: A Critical Reader* (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2006), hlm.267

Lefebvre terkait produksi ruang dan urbanisasi yang bertumpu pada keadilan ruang yang dibentuk oleh masyarakat dan bukan dari pemilik modal. Adapun studi literatur sejenis terkait pemikiran produksi ruang Lefebvre pada bukunya yang berjudul “Space, Difference, Everyday Life Reading” yang mengatakan bahwa Kebijakan penataan kota, pembangunan, dan partisipasi cenderung hanya sebagai kepentingan formal sehingga menggeser kelompok marginal.⁸⁵ ruang pasar diproduksi melalui kebijakan pemerintah, revitalisasi dinilai tidak netral secara sosial karena ruang dikonsumsi bukan hanya oleh pedagang melainkan pengguna melihat sebagai tempat interaksi sosial, tawar menawar, dan kepercayaan antar pedagang dan penjual.⁸⁶ Dengan demikian, perkembangan kota memperlihatkan proses produksi ruang yang timpang, dimana negara dan modal membentuk struktur kota yang timpang.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dijelaskan di atas, penelitian peneliti tersebut relevan dengan revitalisasi, ruang publik dan juga sektor informal. Namun dalam kajian literatur tersebut dengan penelitian yang dilakukan masih memiliki beberapa perbedaan yang menjadi dasar peneliti dalam melakukan penelitian ini. Cenderung sebagian peneliti yang membahas mengenai revitalisasi hanya berfokus pada aspek bangunan dan perencanaan tata ruang kota, seperti desain kawasan, konsep Transit Oriented Development (TOD), penataan infrastruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Bertolini dan Dian Kusumowardhani menekankan aspek peran stasiun sebagai node dan place, namun tidak secara mendalam melihat bagaimana perubahan yang terjadi dan berdampak secara langsung pada keberlangsungan sektor informal, khususnya PKL.

Kemudian, penelitian yang berkaitan dengan sektor informal cenderung membahas mengenai peran ekonomi dan bagaimana ketahanan sosial PKL terjadi. Hal ini seperti peran PKL di lapangan kerja, bagaimana strategi bertahan hidup PKL, dan modal sosial mereka di dalam kelompok marjinalnya. Kajian sebelumnya

⁸⁵ Kanishka Goonewardena dkk., *Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre* (New York: Routledge, 2008).

⁸⁶ Agus Ekomadyo dan Ike J. Triwardhani, *Social Production and Consumption of Space: Study of Public-Market in Bandung, Indonesia*, *Journal of Architecture and Urbanism* Vol. 48 no. 1, (2024)

cenderung membahas PKL secara sendiri dan belum mengaitkan secara spesifik dengan kebijakan revitalisasi berdasarkan kawasan infrastruktur transportasi. Dalam penelitian ini, perubahan ruang yang terjadi berpotensi memunculkan sebuah ketegangan antarkepentingan.

Secara titik penelitian juga, Stasiun Pasar Minggu masih minimnya dilakukan sebuah penelitian yang menggabungkan dinamika sosial ekonomi PKL dengan mobilitas transportasi. Cenderung para peneliti hanya berfokus pada kawasan Pasar Minggu. Padahal perubahan yang terjadi di kawasan Stasiun Pasar Minggu ini cukup signifikan, terutama pada aktivitas PKL. Sebagian besar peneliti, hanya berfokus pada aspek transportasi saja atau penataan kawasan atau dampak bagi PKL saja, tanpa menggali kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor informal.

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 Kebijakan Revitalisasi

Tujuan dilakukannya revitalisasi sebuah kawasan adalah meningkatkan vitalitas kawasan terbangun lewat intervensi perkotaan yang mampu menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi lokal, sistem kota yang layak huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan lingkungan.⁸⁷ Revitalisasi harus dipahami sebagai sebuah proses yang mengarah pada perwujudan suatu lingkungan yang layak, sesuai aspirasi rakyat, ramah lingkungan, sesuai kemampuan sumber daya setempat, dan daya dukung lahan.⁸⁸ Pada tahun 2021, *United Nations-Habitat* mengatakan bahwa ruang publik seharusnya mampu diakses oleh berbagai kalangan di masyarakat, termasuk kelompok rentan.⁸⁹ Dalam melakukan kegiatan revitalisasi kawasan memiliki beberapa azas pembangunan yang dijadikan acuan

⁸⁷ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan*.

⁸⁸ Martokusumo, Widjaja. *Revitalisasi, Sebuah Pendekatan Dalam Peremajaan Kawasan*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 19/No. 3, (2008), hal 57-73.

⁸⁹ Jerry Eduard, Sri Prasetya, (2026), *Revitalisasi dan Pemanfaatan Tepi Sungai Rawalumbu Jembatan 1 Sampai dengan Jembatan 3 Bekasi, Jawa Barat*, JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, Vol.03 (01), hlm. 481-490.

dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum no.18/PRT/M/2010, yaitu sebagai berikut:

1. Berkeadilan.
2. Keberlanjutan.
3. Keberdayaan masyarakat lokal.
4. Kebersamaan dan kemitraan.
5. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Dalam melakukan sebuah proses revitalisasi, akan mencakup perbaikan aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek fisik.⁹⁰ Dengan demikian, revitalisasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengubah lingkungan yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif sehingga mampu menciptakan ruang kota yang berkelanjutan sesuai dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*), yang mana perubahan ini harus mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan kawasan. Menurut Pedoman Revitalisasi, Pelaksanaan revitalisasi mencakup :⁹¹

1) Tahapan Persiapan Pelaksanaan Konstruksi Fisik

- a. Konsultasi Publik : Konsultasi publik dilakukan dalam suatu forum konsultasi publik untuk sosialisasi program secara detail sesuai dokumen pelaksanaan dengan maksud agar masyarakat terkait dapat mengetahui dan jika mungkin dapat berpartisipasi untuk kelancaran konstruksi fisik. Forum konsultasi publik melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan tersebut yang terdiri dari unsur masyarakat, pengusaha, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
- b. Aspirasi dan Komplain : Aspirasi dan komplain merupakan forum yang disediakan untuk menampung tanggapan dan komplain tertulis agar seluruh

⁹⁰ Rizki Nurul, Cahya Gilang, (2023), *Pengaruh Revitalisasi Monumen Nasional sebagai Penunjang Peningkatan Minat Berkunjung*. *Junal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9 (7), hlm. 371-380

⁹¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan*.

kegiatan dalam masterplan revitalisasi kawasan dapat terwujud dengan aman, baik dan tanpa ketegangan.

2) Intervensi Pemerintah dalam Pelaksanaan Konstruksi Fisik

Intervensi Pemerintah dapat dilakukan melalui intervensi fisik dan intervensi non fisik. Intervensi fisik Pemerintah dapat dilakukan melalui pemberian bantuan stimulan dalam bentuk fisik yang diharapkan menjadi pemicu (trigger) bagi terwujudnya seluruh rencana dalam masterplan.

3) Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan

Revitalisasi suatu kawasan merupakan upaya bersama yang menjadi tanggung jawab bersama, baik dari masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah yang berperan sebagai pendorong kebijakan. Namun, terkadang setiap elemen yang terlibat bertindak secara terpisah sehingga diperlukan sinkronisasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, hingga pemanfaatan. Masterplan revitalisasi kawasan dapat terwujud dengan aman, baik dan tanpa ketegangan.

Dalam melakukan sebuah revitalisasi, pastinya akan menimbulkan dampak kebijakan bagi sektor ekonomi di kawasan tersebut. Adapun indikator dampak ekonomi menurut Stynes direct effect, yaitu ⁹²

- Penjualan

Aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Pada proses penjualan, penjual memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli dengan suatu harga tertentu. Penjualan dilakukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi penjualan tidak selalu mengalami peningkatan atau menghasilkan keuntungan yang besar. Aspek penjualan dapat dilihat melalui volume penjualan.

⁹² Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung* (Provinsi Banten, 2013).

- Pendapatan

Sistem balas jasa oleh satu pihak terhadap pihak lainnya karena ada kegiatan produksi barang maupun jasa di dalamnya. Pendapatan pedagang dapat diukur melalui dua indikator (Sari, 2020:23) yaitu melalui keuntungan dan penghasilan.

- Penyerapan Tenaga Kerja

Terserapnya tenaga kerja di sekitar pasar baik dari luar maupun dari masyarakat sekitar pasar seperti pedagang, tukang becak, pengelola pasar, dll.

1.6.2 Sektor Informal Pedagang Kaki Lima

Sektor ekonomi informal menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari bingkai sosial ekonomi di negara berkembang, terutama wilayah perkotaan. Kota menjadi tempat berkumpulnya aktivitas masyarakat, baik dari industri, jasa, dan perdagangan sehingga menarik masyarakat di luar kota untuk sekedar singgah dan menetap mencari ekonomi baru. Keadaan ini akhirnya menimbulkan peningkatan jumlah penduduk di kota dan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi membuat lapangan pekerjaan berkurang, terutama di sektor formal. Sulitnya lapangan pekerjaan dalam sektor formal membuat masyarakat beralih ke sektor informal guna mencari keuntungan.

Dalam buku yang berjudul *Seperti Roda Berputar* oleh Lea Jellinek, pada tahun 1971-1981 terjadi perubahan yang cukup cepat bagi masyarakat kecil dalam mencari nafkah di pusat kota.⁹³ Setidaknya dalam waktu dua puluh tahun, penduduk kampung yang bekerja dalam sektor informal mengalami perkembangan cepat dan kemerosotan tajam, khususnya tukang becak, industri rumah tangga, perdagangan kecil-kecilan, pelayanan kampung, dan pekerja bangunan. Hingga akhirnya, pada tahun 1970-an mereka mencoba untuk beralih ke sektor formal namun sulit untuk mendapatkan kabar penerimaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Keith Hart,

⁹³ Lea Jellinek, *Seperti Roda Berputar* Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta. Jakarta: LP3ES, (1994). Hlm. 87

bahwa sektor informal adalah sebuah kumpulan atau macam-macam aktivitas yang ada di luar pasar tenaga kerja formal sebagai aktivitas penciptaan pendapatan di perkotaan yang tidak diatur secara resmi oleh negara.⁹⁴ Menurutnya, ekonomi informal sebagai sebuah strategi bertahan hidup (survival strategy) bagi masyarakat yang tidak diserap dengan baik oleh sektor formal.⁹⁵ Sektor informal tidak perlu memiliki izin besar, aturan rumit, dan modal tinggi untuk menjalankan usahanya dan cukup memanfaatkan apa yang ada sebagai tempat untuk tetap hidup.⁹⁶

Konsep terkait pembagian sektor ekonomi, yaitu formal dan informal, diperkenalkan oleh Keith Hart pada tahun 1971.⁹⁷ Kedua sektor ini, istilah untuk mendapatkan kesempatan penghasilan di kota. Sektor formal cenderung memiliki gaji yang berasal dari negara atau sektor swasta dan mendapatkan tunjangan pensiun dan tunjangan pengangguran. Sedangkan, sektor informal meliputi pekerjaan yang sah dan tidak sah. Sektor informal sah meliputi kegiatan primer dan sekunder (perkebunan, pertanian, dan penjahit), distribusi skala kecil (pedagang pasar, PKL, kelontongan, dan lainnya). Sedangkan informal tidak sah meliputi aksi pencurian, judi, pengedar narkoba, penipu, dan lainnya.⁹⁸ Dengan demikian, sektor formal terdiri dari unit usaha yang telah menerima berbagai jenis perlindungan ekonomi dari pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah unit usaha yang tidak dilindungi oleh pemerintah dan sektor ini tidak menggunakan bantuan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, meskipun ada bantuan yang tersedia.⁹⁹

Adapun ciri ciri dari sektor Informal menurut Wirosardjono adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kegiatan tidak teratur, baik dari waktu, modal, maupun keuntungan.

⁹⁴ Keith Hart. *The Informal Economy*. Cambridge Anthropology Vol. 10 No. 2, (1985). Hlm. 54-58

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Deniza Adriani, Relokasi dalam Kota : Strategi Diversifikasi Mata Pencarian Komunitas Kampung Bayam Jakarta Utara, Skripsi, Jakarta: Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, 2025.

⁹⁷ D.J. Rachbini. *Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua*. (Jakarta : Penerbitan LP3ES, 1994) hlm. 26

⁹⁸ Jamaludin. *Sosiologi Perkotaan*. (CV PUSTAKA SETIA: Bandung, 2017) hlm. 267

⁹⁹ *Ibid.*

2. Kegiatan dikategorikan sebagai kegiatan liar akibat tidak tersentuh oleh peraturan pemerintah.
3. Peralatan, perlengkapan, modal, dan omset cenderung kecil dan harian
4. Tempat tidak tetap.
5. Cenderung melayani masyarakat yang berpendapatan rendah.
6. Tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil khusus.
7. Tenaga kerja sedikit dan biasanya berasal dari keluarga, kenalan, atau kerabat dari asal daerah yang sama.
8. Tidak paham terhadap sistem bank, pembukuan, perkreditan, dan lainnya.

Pedagang kaki lima erat kaitannya dengan sektor informal dan tidak dapat dipisahkan. PKL cenderung banyak ditemukan di perkotaan dan di lokasi yang tidak menentu atau nomaden. PKL ini biasanya menempati ruang-ruang terbuka yang sifatnya umum, seperti trotoar atau bahu jalan. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat mereka berdagang.¹⁰⁰ Pedagang kaki lima atau disebut PKL merupakan istilah yang digunakan untuk penaja dagangan yang menggunakan gerobak. Menurut Rusli Ramli, PKL adalah pekerjaan yang tampak jelas dan penting di banyaknya kota, terutama negara berkembang.

Menurut Mc. Gee dan Yeung, PKL adalah orang-orang yang menjual barang atau jasa ditempat umum, terutama pinggir jalan dan trotoar. Namun, semakin berkembangnya jalan. PKL tidak hanya diartikan sebagai pedagang yang ada di trotoar atau bahu jalan saja. Melainkan, usaha pedagang kaki lima yang berada di ruang publik, seperti ruang terbuka, area parkir, taman, terminal, stasiun, jembatan, dan juga pedagang kaki lima yang bergerak keliling dari rumah ke rumah. Menurut McGee dan Yeung¹⁰¹, dibedakan menjadi 3 yaitu pedagang menetap (static), pedagang semi menetap (semi static), dan pedagang keliling (mobile). Tipe

¹⁰⁰ Dwiyantri. *Kajian Pola Ruang PKL dan Karakteristik dan Aktivitasnya di Kawasan Panbil Kota Batam* (Thesis: Universitas Diponegoro, 2005)

¹⁰¹ Umami dan Wakhidah. *Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima Yang Mempengaruhi Terganggunya Sirkulasi Lalu Lintas Di Jalan Utama Perumahan Bumi Tlogosari Semarang*. Jurnal Ruang, Vol.1 No.1 (2013)

unit PKL ini kemudian berkaitan dengan perlakuan terhadap sarana aktivitas PKL setelah aktivitas berakhir, yaitu ditinggal seluruhnya di lokasi berdagang, dibawa pulang sebagian dan ditinggal sebagian dan dibawa pulang seluruhnya. Dengan demikian, PKL sebagai sektor informal sangat berperan penting dalam ekonomi urban.

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih membuat perekonomian juga terdampak. Studi yang telah dilakukan oleh ILO mengatakan bahwa setidaknya.¹⁰² Perbaikan ekonomi terjadi akibat sektor informal yang mampu melakukan adaptasi perilaku dan terus menerus beraktivitas. Bahkan, ketika dunia mengalami pandemi, sektor informal menjadi driving factor terbesar dalam perbaikan perekonomian setelah pandemi.¹⁰³ Dengan demikian, sektor informal merupakan sektor tenaga kerja yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik dalam menyesuaikan diri dengan keadaan.

1.6.3 Pembangunan Kota Menurut David Harvey

Pemikiran David Harvey sama seperti Lefebvre yang menerapkan pemikiran ekonomi Marxis terhadap analisis pembangunan perkotaan. Pemikiran Harvey tentang produksi ruang kota menjelaskan bagaimana kota dan kapitalisme menghasilkan ketidakadilan sosial, terutama bagi masyarakat kota kelas bawah. Harvey mengatakan bahwa sudah seharusnya kota mampu menciptakan ruang dengan kepentingan kolektif dari berbagai kelas sosial.¹⁰⁴ Kota berfungsi sebagai pusat persebaran modal, tempat investasi, produksi, dan pembangunan yang berlangsung dengan tujuan menghasilkan keuntungan.¹⁰⁵ Dalam proses ini, terjalin hubungan antara berbagai kelompok, seperti kapitalis, pekerja, dan pemerintah yang saling berinteraksi dan bersaing dalam pemanfaatan ruang perkotaan.

¹⁰² ILO. *Trends 2022 ILO Flagship Report World Employment and Social Outlook* (2022)

¹⁰³ Rakmawan, S.A. *Digital Transformation Of Informal Workers In The New Normal Era: "Can It Be The Solution We Are Searching For?"*. East Java Economic Journal Vol. 6 No. 2, (2022).

¹⁰⁴ Mark Gottdiener dan Ray Hutchison, *The New Urban Sociology* (Boulder, CO: Westview Press, 2011), hlm.75-99

¹⁰⁵ David Harvey. *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution* (London: Verso, 2012)

Menurut David Harvey, kota adalah tempat di mana proses akumulasi modal berlangsung, yaitu proses perolehan keuntungan yang berulang tanpa henti melalui aktivitas ekonomi di ruang perkotaan. Pembangunan perkotaan bersifat dinamis dan tidak stabil. Harvey memandang ketidakadilan sistem kapitalis terwujud di dalam lingkungan kota, sebab mengandung logika kapitalisme. David Harvey mengembangkan istilah dari Joseph Schumpeter terkait kota, yaitu *creative destruction*.¹⁰⁶ Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah sistem produksi yang dilakukan secara khusus dalam kapitalisme. Mereka akan memberi tempat hidup dan insentif bagi semua komponen yang efisien, namun menghukum mati atau membiarkan mati bagi mereka yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Kemudian, di atas keseluruhan yang telah dihancurleburkan ini akan dibangun sesuai hal yang baru dengan menjamin sebuah keuntungan dan keberlangsungan bagi akumulasi modal. Dengan ini, kota adalah ruang yang terus-menerus diproduksi ulang dengan siklus lingkungan perkotaan dibangun, dan terus-menerus dihancurkan dan dibangun kembali, demi menciptakan wilayah yang lebih efisien untuk sirkulasi. Siklus ini terjadi akibat modal terus berpindah-pindah demi mencari keuntungan yang lebih besar.¹⁰⁷

Proses ini sering kali menyebabkan perubahan fisik pada ruang, seperti pembongkaran kawasan permukiman lama dan pembangunan kawasan baru. Ketidakadilan spasial hadir karena adanya kepentingan, seperti estetika ruang, modernisasi bangunan, dan dibangunnya kepentingan bisnis baru, yaitu kios dan booth di sekitar stasiun. Hal ini akhirnya mengakibatkan penggusuran paksa bagi para PKL, dominasi estetika atas hak ekonomi masyarakat (aturan tata kota yang memprioritaskan kerapian kota tanpa relokasi), hingga pengambilalihan ruang publik untuk kepentingan bisnis.

Pemerintah memainkan peran penting dalam proses ini, khususnya dengan melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran

¹⁰⁶ Noer Fauzi Rachman, *Memahami Reorganisasi Ruang Melalui Perspektif Politik Agraria*, Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015, hlm. 39

¹⁰⁷ William G. Flanagan, *Urban Sociology: Images and Structure* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2010), hlm. 256.

investasi. Misalnya, melalui kebijakan pembangunan atau tata ruang. Oleh karena itu, pembangunan kota tidak bersifat netral dan ada pengaruh kepentingan ekonomi sehingga revitalisasi dilakukan bukan hanya untuk memperindah, tetapi juga untuk meningkatkan nilai ekonomi dan menarik aktivitas masyarakat. Mekanisme *accumulation by dispossession* menurut Harvey, meliputi empat proses utama, yaitu:

1. Privatisasi dan komodifikasi (*Privatization and Commodification*)

Privatisasi dan komodifikasi diartikan sebagai sebuah proses, di mana yang sebelumnya menjadi milik bersama atau digunakan sebagai kepentingan publik diubah menjadi barang yang dapat dimiliki, diperjualbelikan, atau sesuatu yang menghasilkan sebuah keuntungan ekonomi (komersial). Harvey mengatakan, bahwa sejak masa neoliberalisme banyak sekali aset-aset publik dan komunal, seperti tanah, air, udara, pendidikan, kesehatan, hingga kota diprivatisasi sehingga akses masyarakat terhadap aset ini menjadi bergantung pada kemampuan ekonomi yang mereka miliki. Negara sering kali menggunakan kekuasaan ini untuk mendukung mekanisme ini, bahkan ketika sebagian masyarakat menolaknya. Hal ini akhirnya menciptakan perpindahan aset dan sumber daya dari masyarakat biasa (umum) ke kelompok yang memiliki modal atau kekuasaan besar.

2. Finansialisasi (*Financialization*)

Sejak tahun 1980-an, Harvey mengatakan bahwa sektor keuangan ini berkembang pesat yang diperoleh melalui produksi barang, namun melalui aktivitas transaksi keuangan dan investasi, misalnya saham. . Finansialisasi ini yang memungkinkan akumulasi melalui manipulasi sistem kredit dan utang. Dampak dari keadaan tersebut akhirnya memicu kekayaan yang hanya berfokus pada kelompok tertentu saja, tetapi banyak masyarakat yang kehilangan aset atau terjebak dalam utang.

3. Manajemen dan manipulasi krisis (*Management and Manipulation of Crises*)

Selain melalui privatisasi dan akomodasi, finansialisasi, adapun peluang akumulasi terjadi melalui devaluasi aset. Harvey mengatakan bahwa keadaan krisis ekonomi sering sekali dimanfaatkan sebagai sebuah alat untuk memindahkan kekayaan dari kelompok lemah kepada kelompok pemilik modal. Saat terjadinya krisis, nilai aset akan turun sehingga banyak orang yang akan kehilangan kemampuan mereka dalam mempertahankan aset yang mereka miliki. Pada saat yang sama, kelompok pemilik modal akan membeli dan menguasai aset kelompok lemah dengan harga yang murah.

4. Redistribusi Negara (*State Redistribution*)

Sering kali kebijakan pemerintah akan menguntungkan kelas kapitalis. Pada masa neoliberalisme, negara berperan besar sebagai pihak yang memberikan bantuan dalam perpindahan kekuasaan dari kelompok lemah ke kelompok yang kuat. Hal ini dapat dilakukan melalui privatisasi, perubahan kebijakan, pengurangan perlindungan sosial, pemberian insentif kepada investor, dan penggunaan kekuasaan negara untuk mendukung proyek pembangunan. Negara tidak selalu menjadi bagian yang netral, malah menjadi aktor yang membantu proses akumulasi modal oleh kelompok pemilik modal.¹⁰⁸

Namun, proses akumulasi modal ini menimbulkan ketidaksetaraan sosial dan spasial, Hal ini dikarenakan tidak semua kelompok menikmati keuntungan yang sama. Harvey menyoroti bahwa ketidakadilan sosial merupakan hasil dari proses akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*), di mana para kelas atas kapitalis merampas aset publik dan swasta untuk meningkatkan kekuasaan serta kekayaan mereka. Proses ini melibatkan kepemilikan layanan publik, perampasan tanah, dan pengurangan subsidi untuk publik.

¹⁰⁸ David Harvey. *A Brief History of Neoliberalism*. (Oxford: Oxford University Press, 2005) hlm. 160-165.

Ketidakadilan adalah sebuah tindakan secara sewenang-wenang yang mengacu pada pendistribusian secara tidak proporsional, baik itu hak individu atau kelompok, dan juga tidak ditangani oleh negara, maka akan timbul permasalahan sosial¹⁰⁹ Spasial secara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada konteks keruangan atau tempat. Oleh karena itu, ketidakadilan spasial secara umum adalah distribusi sumber daya, peluang, dan aksesibilitas yang tidak merata di berbagai wilayah geografis.¹¹⁰ David Harvey juga mendeskripsikan bagaimana kapitalis menciptakan ruang yang tidak merata sehingga mengakibatkan pemisahan fisik antara lingkungan kaya dan miskin. Hal ini mendorong terjadinya kesenjangan ruang yang menjadi penyebab utama dari ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya dan layanan publik.

Sistem kapitalis umumnya menempatkan kelompok-kelompok tertentu, seperti kelas bawah atau para pekerja, di posisi yang rendah dalam struktur sosial. Harvey berpendapat bahwa penindasan ini meminggirkan kelompok tersebut dan membatasi akses mereka terhadap peluang dan sumber daya sehingga memperparah ketidakadilan yang ada. Kelas atas cenderung menguasai aset penting masyarakat, seperti tanah atau layanan publik untuk menambah kekayaan mereka sendiri. Harvey menjelaskan bahwa kondisi tersebut mengakibatkan kekayaan semakin terpusat pada kelompok yang memiliki modal besar, sementara sebagian besar masyarakat justru kehilangan akses terhadap sumber daya yang sebelumnya dapat dinikmati secara bersama.¹¹¹

Munculnya ketidakadilan spasial dalam perspektif Harvey tidak dapat lepas dari surplus kapital dan tenaga kerja. Surplus kapital dan tenaga kerja secara alamiah dapat menimbulkan devaluasi. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah memindahkan kapital dan tenaga kerja tersebut ke tempat lain. Berpindahnya tenaga kerja ke tempat lain kemudian berkaitan dengan isu urbanisasi. Bukan hanya

¹⁰⁹ Djuans O, M. Liwa,dkk, (2023), *Ketidakadilan Pembinaan Terpidana berdasarkan Modalitas dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.1 (1), hlm.7

¹¹⁰ R. Morrill, 2001, *Spatial Inequality*, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, hlm. 14789-14792. Doi: <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02484-0>

¹¹¹ *Ibid.*

tenaga kerja, kapital juga ikut berpindah ke tempat lain untuk menghindari devaluasi. Di sinilah kapitalisme menemukan konteks ruang yang ketika terjadi secara berkelanjutan akan melahirkan isu-isu ketidakadilan spasial seperti segregasi spasial atau pengambilan ruang untuk kepentingan bisnis.¹¹²

Perpindahan modal ke wilayah baru ini disebut *spatial fix*. Kapitalisme ini dianggap memperbaiki masalah kelebihan modal dengan memperluas investasi ke ruang baru. Namun, solusi ini hanya bersifat sementara karena suatu saat ketika wilayah baru tersebut juga bisa mengalami kejenuhan dan modal akan mencari tempat lain lagi. Sehingga, kota akan diproduksi bukan dari kebutuhan masyarakat, tetapi berdasarkan pada kepentingan akumulasi modal.

David Harvey dalam teorinya "Right to the City", menjelaskan bahwa ruang kota cenderung dikendalikan oleh kekuatan ekonomi yang besar, sementara akses masyarakat kecil terhadap ruang publik dibatasi atas nama penataan kota.¹¹³ Menurut Harvey, persoalan ruang yang di dalamnya terdapat ketidakadilan adalah persoalan hak atas kota. Hak ini bukan sekadar hak untuk mengakses sumber daya yang ada di dalam ruang perkotaan. Hak atas kota adalah hak untuk mengubah diri sendiri (dalam makna kolektif) dengan mengubah ruang kota, untuk kemudian melakukan perubahan dalam isu-isu ketidakadilan spasial. Harvey berpendapat terhadap hak produksi ruang kota, antara lain kota sebagai:

1. Ruang kolektivitas: setiap warga kota mempunyai hak permintaan atas kebutuhan paling mendasar, seperti hak untuk tidak takut terhadap kondisi kota, hak untuk menikmati kota, hingga hak untuk menjadikan kota "bermakna" untuk warganya dan hak untuk mendapatkan perumahan layak dan terjangkau.

¹¹² Kanishka Goonewardena dkk., *Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre* (New York: Routledge, 2008).

¹¹³ Jonner Marulitua Butarbutar1, Hudi Yusuf. *Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial*. Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 3, No. 3, hlm. 768-772

2. Ruang negosiasi, Harvey menggunakan konsep *commonality*, yakni melihat bahwa manusia pada dasarnya mempunyai nilai kepentingan yang disepakati dan dibangun bersama. *Commonality* masyarakat merupakan jalan alternatif dari privatisasi dan monetisasi.
3. Ruang keterbukaan, ruang yang dapat diakses, dinikmati, dan diubah oleh seluruh warga tanpa batasan ekonomi atau sosial (*inclusivity*).
4. Ruang untuk berserikat: ruang fisik dan sosial yang memungkinkan warga untuk berkumpul, berorganisasi, dan melakukan perlawanan kolektif terhadap ketidakadilan spasial.¹¹⁴

Akibat transformasi kota yang terus-menerus dilakukan tanpa memperhatikan kelompok kecil, terjadilah gentrifikasi ruang. Gentrifikasi dipahami sebagai bagian dari dinamika kapitalisme yang melibatkan relasi kuasa, konflik sosial, dan perubahan budaya.¹¹⁵ Gentrifikasi merupakan proses perubahan kawasan urban yang awalnya bagian dari modernisasi dan pembangunan wilayah tidak tertata, namun dalam kenyataannya sering kali membawa konsekuensi negatif, seperti penggusuran tidak langsung terhadap warga lokal. Peningkatan nilai properti dan tanah akibat proses ini menyebabkan kelompok berpenghasilan rendah tersingkir dan terpaksa meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.¹¹⁶

Harvey mengatakan pada teorinya tentang regenerasi perkotaan, gentrifikasi adalah hasil dari bagian strategi ekonomi perkotaan yang dilakukan untuk menarik investasi lewat sektor wisata dan pengembangan bisnis, baik dari pemerintah maupun investor akan memanfaatkan potensi ruang kota ini sehingga menciptakan nilai ekonomi.¹¹⁷ Namun, akhirnya malah mengorbankan akses masyarakat setempat ke lingkungan mereka sendiri. Dalam istilah umum, gentrifikasi

¹¹⁴ HANIFAH RAHMAH. (2020). *Produksi Ruang Kota Di Masyarakat Pinggiran (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Kebon Bawang RT 13 RW 05 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara)*. Sarjana thesis, UNJ.

¹¹⁵ Meli R, Elza R,dkk, 2025, *Gentrifikasi Dan Wajah Baru Ketimpangan: Tinjauan Kritis Atas Dampak Sosial Perkotaan*, Merdeka Indonesia Journal International (MIJI) Vol. (1), hlm. 62

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Herniati Pratiwi, Reylin A,dkk, 2026, *Gentrifikasi Kawasan Permukiman Akibat Perkembangan Komersial dan Pariwisata di Kawasan Dago Giri, Bandung*. Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 02 (04), hlm. 453-460.

merupakan suatu proses penduduk kota yang berpenghasilan rendah secara bertahap dipinggirkan secara fisik dan ditekan secara simbolis oleh kelompok berpenghasilan lebih tinggi serta modal komersial masuk ke area informal.¹¹⁸

1.6.4 Hubungan Antar Konsep

Di antara kebijakan revitalisasi, sektor informal pedagang kaki lima, dan perspektif kota menurut Harvey memberikan kajian konsep yang berhubungan satu dengan yang lain. Guna memudahkan dalam memahami antar konsep tersebut, adapun skema hubungan antar konsep dalam penelitian ini sebagai berikut.

Skema 1.1 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Hasil Interpretasi Penulis, 2025

¹¹⁸ *Ibid.*

Revitalisasi tidak pernah berdiri sendiri. Revitalisasi pada konsep ini berfungsi untuk mengatur atau menata ulang sebuah ruang. Revitalisasi muka Stasiun Pasar Minggu berdampak pada sektor ekonomi informal, yaitu pedagang kaki lima. PKL sering kali beraktivitas di Stasiun Pasar Minggu sebagai tempat mereka berjualan. Mereka memanfaatkan ruang terbuka, terutama masyarakat yang keluar Stasiun Pasar Minggu sebagai target pembelinya.

Produksi ruang tercipta akibat revitalisasi. Program revitalisasi yang dilakukan tidak semata-mata terjadi begitu saja, melainkan banyak sektor yang terlibat. Aktivitas PKL yang memiliki peran dalam memproduksi sebuah ruang. Ruang yang tercipta dari revitalisasi akan berubah fungsi. Dalam hal ini, ruang stasiun pasar minggu sebagai hasil proses dan bukan sebagai hasil desain saja. Revitalisasi yang digunakan untuk mengatur dan menata ulang ruang ini memengaruhi produksi ruang yang ada sehingga berdampak pada beberapa aktor yang menggunakan ruang itu sendiri, salah satunya sektor informal (pedagang kaki lima).

Produksi ruang melalui pandangan David Harvey melihat adanya kekuasaan sebagai alat kelas dominan yang terjadi di lapangan. Dimana ruang diproduksi untuk kepentingan sang pemilik modal sehingga mengorbankan kelompok marjinal dengan cara, seperti pengurusan atau marginalisasi sektor informal. Melalui hal ini akan terlihat siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh produksi ruang yang dihasilkan. Akumulasi ini terjadi dengan cara mengambil atau mengalikan sumber daya dari masyarakat, dapat berupa privatisasi ruang publik, pengurusan lahan, dan lain-lain). Dengan demikian, ruang kota yang ada di Stasiun Pasar Minggu bukan hanya sebagai kebutuhan sosial dan transportasi, melainkan juga terdapat kebutuhan ekonomi dalam penggunaan fungsi ruang kotanya. Revitalisasi kawasan ini bisa jadi bukan penataan ruang kota semata, tetapi proses ruang publik yang diambil alih sehingga kelompok kecil kehilangan akses ekonominya.

Dampak dari revitalisasi stasiun dan pengurusan paksa PKL akhirnya akan menimbulkan persoalan tata kota yang semakin lekat. Revitalisasi dengan

mendorong terjadinya investasi masuk akan mendorong terjadinya gentrifikasi ruang. Di mana ruang tidak lagi digunakan sebagai bagian dari publik, melainkan digunakan untuk kepentingan komersial. Selain itu, proses revitalisasi dan penggusuran ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan spasial bagi pengguna ruang yang membuat mereka semakin terpinggirkan. Ketidakadilan yang semakin condong kepada pihak pemilik modal akan mendorong fenomena gentrifikasi yang membuat masyarakat kecil, seperti PKL terpinggir dan semakin lama akan kehilangan ruang yang selama ini nilainya mereka bangun.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Studi kasus pada penelitian ini adalah sektor informal pedagang kaki lima di wilayah Pasar Minggu. Dalam buku W. Lawrence Neuman mengatakan bahwa metode kualitatif adalah metode yang tidak berfokus pada angka atau statistik, tetapi mencoba memahami lebih mendalam terkait makna, pengalaman, dan realitas sosial yang ada.¹¹⁹

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena memberikan pandangan yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Masalah-masalah yang teliti ini bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan memiliki pemikiran tersendiri sehingga harus adanya instrumen kualitatif, seperti pedoman wawancara. Peneliti juga ingin memahami realitas sosial dari subjek yang terkena dampak kebijakan. Penelitian ini ingin melihat kebijakan revitalisasi ini berkaitan dengan situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitarnya, terutama di wilayah dengan pusat kegiatan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari W. Lawrence Neuman, bahwa dalam penelitian lapangan, kita akan mengumpulkan data

¹¹⁹ Neuman, W. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. (Assex: Pearson Education Limited, 2014). hlm.447.

kualitatif guna menggambarkan secara rinci tentang manusia, tindakan, dan peristiwa di kehidupan sosial.¹²⁰

Pada metode studi kasus yang peneliti lakukan, peneliti melakukan sebuah penyelidikan secara mendalam terhadap globalisasi dan modernisasi stasiun berperan sebagai pemicu perubahan dalam jaringan sosial PKL, relasi kekuasaan informal, serta adaptasi ekonomi PKL dalam menghadapi modernisasi perkotaan. Peneliti ingin melihat bagaimana dinamika sosial ekonomi terjadi pada sektor informal Pedagang Kaki Lima di wilayah stasiun Pasar Minggu.

Adapun batasan dari penelitian ini yang difokuskan pada wilayah sekitar Stasiun Pasar Minggu, khususnya di depan area pintu masuk Stasiun Pasar Minggu yang terdampak langsung oleh kebijakan revitalisasi. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan revitalisasi stasiun, dampak yang ditimbulkan, dan perubahan setelah revitalisasi sehingga peneliti tidak membahas aspek teknis pembangunan fisik secara mendetail, terutama desain arsitektur atau konstruksi bangunan. Selain itu, keterbatasan lain adalah kondisi staff yang tidak menetap dalam jangka waktu lama juga berpengaruh sehingga peneliti mengambil catatan hasil wawancara dari beberapa sumber tambahan lainnya.

1.7.2 Subjek Penelitian

Pada penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada dinamika sosial ekonomi dalam sektor informal di sekitar Stasiun Pasar Minggu. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan cara mengambil informan secara sengaja sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, subjek peneliti adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan dan beraktivitas di sekitar stasiun Pasar Minggu yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu menetap, semi menetap, berkeliling. Adapun data

¹²⁰ *Ibid.*

pendukung lainnya, yaitu dari para pengguna kios yang ada di sekitar stasiun Pasar Minggu, Petugas KAI Stasiun Pasar Minggu, dan Satpol PP Kelurahan Pejaten Timur. Rincian dari subjek penelitian sebagai berikut.

Tabel 1.2 Karakteristik Subjek Penelitian

No.	Nama	Usia	Pekerjaan	Posisi Informan
1.	AK	36 Tahun	Komandan Regu Satuan Pengamanan	Petugas Stasiun Pasar Minggu
2.	I	50 Tahun	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP)	Satpol PP Kelurahan Pejaten Timur
3.	As	63 Tahun	Keliling (Minuman)	PKL
4.	An	30 Tahun	Semi Menetap (Siomay dan Batagor)	PKL
5.	W	54 Tahun	Semi Menetap (Makanan)	PKL
6.	SH	34 Tahun (Penerus)	Menetap (Warung Kecil)	PKL
7.	R	50 Tahun	Semi Menetap (Bubur Ayam)	PKL
8.	Am	46 Tahun	Keliling (Masker, Pentul, dan lain-lain)	PKL
9.	S	22 Tahun	Menetap (Ruko, Kopi Janji Jiwa)	Kios

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian yang memiliki peran penting dalam penelitian yang dilakukan. Petugas Stasiun Pasar Minggu dan Kepala Satpol PP Kelurahan Pejaten Timur menjadi triangulasi pada penelitian ini. Petugas Stasiun Pasar Minggu menjadi informan terkait kebijakan revitalisasi yang dilakukan di Stasiun Pasar Minggu sehingga memiliki pengetahuan terhadap kebijakan yang dilakukan

dan kondisi para PKL di depan Stasiun Pasar Minggu. Sedangkan, Satpol PP menjadi informan guna peraturan yang diberlakukan untuk para PKL yang melakukan aktivitas ekonominya di tempat yang tidak seharusnya.

Kemudian peneliti, membagi subjek penelitian kepada para pedagang yang berada disekitar depan Stasiun Pasar Minggu. Subjek penelitian ini adalah pedagang sebagai subjek yang terkena dampak dari kebijakan revitalisasi stasiun pasar minggu yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Keliling sebanyak dua orang, semi menetap sebanyak tiga orang, dan menetap yang berupa kios bangunan dan warung kecil 24 jam yang masing-masingnya sebanyak satu orang. Melalui kombinasi data dari informan-informan tersebut akan menggambarkan bagaimana kebijakan revitalisasi Stasiun Pasar Minggu dalam sektor informal PKL.

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekitar Stasiun Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode secara *offline*, yaitu dilakukan secara langsung tatap muka dengan mewawancarai informan yang bersangkutan. Lokasi Penelitian tepat berada di sekitar Pintu Keluar/Masuk Stasiun Pasar Minggu sampai dengan bawah JPO Pasar Minggu. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa terdapat PKL, baik itu semi menetap sampai dengan keliling.

Dari pengamatan awal PKL berjumlah sekitar kurang lebih 24 PKL yang sedang berjualan. Selain itu lokasi ini merupakan wilayah strategis karena diapit oleh pasar modern, yaitu Ramayana dan pasar tradisional Pasar Minggu. Selain itu, wilayah ini juga sebagai berseberangan dengan terminal Pasar minggu dan menjadi tempat lintas transportasi umum, seperti angkot, jaklingko, dan transjakarta. Di Belakang Stasiun Pasar Minggu juga merupakan pemukiman masyarakat dan sebagai jalan pintas menuju daerah Condet. Dengan demikian, aktivitas sosial ekonomi yang terjadi di wilayah

ini cukup ramai. Ditambah lagi dengan ruang publik Stasiun Pasar Minggu sebagai mode transportasi yang sudah lama berdiri, bahkan dari zaman belanda. Stasiun Pasar Minggu juga mengalami masa ramai di jam jam berangkat dan pulang kantor masyarakat sekitar. Oleh karena itu, wilayah ini dianggap sebagai lokasi yang tepat bagi peneliti karena mampu memenuhi kriteria PKL dan mengetahui kondisi lingkungan yang terjadi.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu yang panjang, yaitu mulai dari akhir April 2025 sampai Akhir Maret 2026. Pemilihan waktu yang dilakukan oleh peneliti ini telah dipertimbangkan secara matang guna mengetahui fenomena yang diteliti mengalami pembaharuan. Rentan waktu ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati kegiatan sosial ekonomi para PKL dan kebijakan kebijakan yang dilaksanakan. Dengan ini, peneliti dapat mengamati segala perkembangan dan perubahan yang terjadi oleh para PKL. Melalui observasi secara terus menerus dalam kurun waktu yang cukup panjang ini, diharapkan peneliti mampu memahami perubahan perilaku, pola hubungan yang terjadi, kondisi sosial ekonomi, serta kebijakan yang dilakukan, baik dari pihak Stasiun Pasar Minggu atau Satpol PP setempat.

Hal ini penting untuk peneliti pahami secara utuh karena berpengaruh pada perubahan pola perilaku dan sosial ekonomi si penerima dampak kebijakan. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara utuh bagaimana revitalisasi Stasiun Pasar Minggu ini berkaitan dengan dinamika sosial ekonomi para PKL terdahulu, maupun sekarang. Dengan demikian, peneliti memiliki waktu setidaknya satu tahun 3 bulan untuk mendapatkan segala bentuk informasi dan data yang akurat sehingga dapat diolah sebagai kajian yang bermakna dan bermanfaat bagi seluruh sektor.

1.7.4 Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti memegang peran sentral dan bertanggung jawab penuh mulai dari merancang ide dan menyusun rencana kerja, hingga mengumpulkan serta mengolah semua data yang diperoleh dari informan maupun hasil pengamatan lapangan. Peran ini penting karena menyangkut proses analisis mendalam terhadap dinamika sosial ekonomi yang terjadi pada sektor informal PKL di wilayah pinggiran rel kereta api Stasiun Pasar Minggu. Peneliti memiliki tanggung jawab utama untuk mengumpulkan data yang mendalam dan komprehensif, demi menghasilkan temuan yang berkualitas dan relevan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan membangun hubungan dan kepercayaan yang kuat dengan informan. Pendekatan ini penting agar para informan merasa aman dan nyaman untuk berbagi informasi yang akurat dan jujur.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder, maka adapun klasifikasi sumber data ke dalam jenis jenis data sebagai berikut :

1.7. 5.1 Data Primer

Data Primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data.¹²¹ Data primer penelitian berasal dari observasi peneliti dan hasil wawancara, mulai dari wawancara terstruktur hingga mendalam. Data primer ini dilakukan guna mengetahui permasalahan dan fenomena yang terjadi selama perkembangan, baik dari sebelum revitalisasi dilakukan sampai dengan kondisi saat ini. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan para PKL, mulai dari berkeliling, semi menetap, sampai menetap (kios) dengan fokus para PKL makanan,

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

minuman, dan asongan. Selain itu, juga dilakukan wawancara kepada petugas yang ada di stasiun Pasar Minggu dan Satpol PP Pejaten Timur sebagai pemilik kebijakan.

a) Observasi

Pertama, peneliti menggunakan teknik observasi pendahuluan berupa pengamatan langsung yang dilakukan ke lokasi penelitian sebelum menyusun proposal secara menyeluruh selama kurang lebih satu bulan, dari bulan April sampai dengan tanggal 2 Mei 2025. Observasi ini dilakukan di berbagai waktu, baik pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari di berbagai kesempatan. Penulis melakukan observasi awal yang tujuannya adalah untuk mengenali kondisi awal kawasan penelitian, mengamati posisi dan aktivitas sosial ekonomi para PKL, mengetahui dinamika sosial ekonomi yang terjadi diantara seluruh pihak, dan menetapkan fokus masalah yang sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Marshall (1995), yaitu melalui observasi, peneliti mempelajari tentang perilaku dan makna yang melekat pada perilaku tersebut.¹²² Selama tahapan observasi dilakukan, peneliti melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan yang relevan dengan penelitian yang dianggap, baik dari lingkungan depan stasiun Pasar Minggu, Trotoar yang berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar stasiun, kebersihan lingkungan, keberadaan PKL/Kios, dan aktivitas sosial ekonomi yang terjadi. Tahap ini menjadi langkah dasar peneliti dalam merumuskan permasalahan yang terjadi secara lebih tepat.

b) Wawancara Mendalam

Setelah melakukan observasi awal, peneliti mulai menyusun persiapan guna melakukan wawancara mendalam kepada subjek peneliti yang telah ditentukan. Sebelum turun langsung ke lapangan, peneliti

¹²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm 226.

melakukan olah data, berupa deskripsi pada observasi awal. Tahapan wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan segala informasi sebagai pihak yang terkena dampak revitalisasi. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang dari pengalaman langsung para informan.

Wawancara pertama kali dilakukan oleh empat pedagang langsung, pada tanggal 2 Mei 2025 (wawancara dengan para pedagang, yaitu Bu Asri, Pak Wahdi, Pak Andi, dan Kak Syifa) dan melakukan wawancara kembali sebagai pembaharuan data, mulai dari bulan Februari - Maret 2026. Peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada kepala keamanan Stasiun Pasar Minggu pada tanggal 13 Maret 2026. Kemudian melakukan wawancara terstruktur kepada kepala satuan pamong praja Kelurahan Pejaten Timur pada tanggal 20 Maret 2026. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur pada tanggal 26 Maret 2026 kepada para PKL (wawancara dilakukan kepada 7 orang pedagang, yaitu Bu Asri, Pak Wahdi, Pak Andi, Kak Syifa, Sri Hartati, Riswo, Amir). Setiap wawancara yang dilakukan, direkam dan dilakukan olah data, berupa axial coding guna dianalisis secara lebih mendalam.

1.7.5.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹²³ Data sekunder diperoleh dari dokumen, seperti foto, video, internet, dan penelitian terdahulu, yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai referensi. Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan sehingga peneliti tidak terlibat aktif dalam kegiatan berlangsung. Pada pengumpulan data primer yang dilakukan, peneliti melakukan pengumpulan juga pada data sekunder sebagai pelengkap data yang diteliti secara bertahap, mulai dari April 2025 - Maret 2026. Selain

¹²³ *Ibid.*

teknik observasi dan wawancara mendalam yang telah dilakukan, peneliti melakukan pencarian terhadap studi literatur sejenis, baik dari membaca website berita, artikel ilmiah, jurnal nasional, jurnal internasional, dan sumber sumber terkait lainnya. Tahapan ini penting dilakukan sebagai acuan dasar teori yang digunakan dan memberikan konteks pada isu yang diteliti.

Peneliti mencari dan membaca sumber yang sekiranya relevan dengan topik penelitian yang diangkat, mulai dari konsep revitalisasi, ruang kota, sektor informal, pedagang kaki lima, dan dinamika sosial ekonomi. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan info terkait pengusuran PKL yang terjadi di depan pintu masuk/keluar stasiun pasar minggu dan sejarah perkembangan perkeretaapian. Peneliti juga memanfaatkan dokumentasi yang diambil, baik secara offline atau online guna mengumpulkan bukti bukti terkait kegiatan revitalisasi stasiun pasar minggu. Data data ini, mulai dari studi literatur sejenis sampai dokumentasi yang diambil merupakan data penting peneliti dalam menulis kajian ini agar bisa memahami situasi sosial ekonomi yang terjadi akibat revitalisasi stasiun pasar minggu.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Pada tahapan ini, peneliti melakukan analisis data dengan teknik yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap data yang telah diolah sebelumnya. Mereduksi dimaksud adalah proses dari merangkum, memilih milih hal pokok, fokus pada hal penting, dan mencari tema dan pola yang terjadi.¹²⁴ Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dari hasil observasi, wawancara, studi literatur sejenis, dan dokumentasi yang dipilih datanya guna dilakukan analisis. Kemudian dilakukan penyempurnaan data yang dirasa masih kurang relevan dengan isu yang dibawa oleh peneliti. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis secara intensif, dilakukan pengembangan

¹²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cet. IV (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 405

berdasarkan sub bab yang telah ditentukan sebelumnya dan diakhiri pada penarikan kesimpulan. Tahapan ini dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara mendetail tentang isu penelitian atau terkait kelompok/individu yang sedang diteliti, kemudian dianalisis datanya guna interpretasi data temuan.¹²⁵

1.7.7 Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.¹²⁶ Nantinya data yang telah terkumpul akan dilakukan validasi data kepada informan yang terpercaya guna melakukan analisis data yang valid dan benar. Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi data, yaitu melakukan wawancara kepada Kepala Satpol PP Pejaten Timur selaku Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan PKL di depan stasiun Pasar Minggu.

1.8 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam melakukan penelitian ini, dibuatkan sebuah sistematika penelitian yang dibagi menjadi 5 bab, sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan: Bab satu akan berisi, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, kerangka konseptual, metode penelitian, teknik triangulasi, dan sistematika penulisan.

Bab II Kawasan Stasiun Pasar Minggu Pasca Revitalisasi: Pada bab ini peneliti mendeskripsikan tentang wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, termasuk dalam penelitian ini Stasiun Kereta Api Pasar Minggu. Selain itu, peneliti sejarah perkembangan kawasan Pasar Minggu dan kereta api sebagai modernisasi transportasi, pembagian wilayah pengelolaan kawasan Stasiun Pasar Minggu,

¹²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 243–245

¹²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015)

kebijakan revitalisasi kawasan Stasiun Pasar Minggu dan bagaimana kondisi pra dan pasca-revitalisasi.

Bab III *Accumulation by Dispossession* Ruang pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Stasiun Pasar Minggu: Pada bab ini peneliti memaparkan hasil temuan yang telah didapat, baik dari karakteristik PKL di kawasan ini, proses penertiban PKL, mekanisme *Accumulation by Dispossession* yang terjadi, dan jumlah PKL dari waktu ke waktu.

Bab IV Transformasi Ruang Kawasan Stasiun Pasar Minggu: Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang dianalisis bersama konsep teori oleh David Harvey. Pada bab ini, peneliti ini akan membagi menjadi tiga bagian, yaitu siklus pembangunan ruang kota, ketidakadilan spasial, dan proses gentrifikasi ruang yang terjadi di kawasan ini.

BAB V Penutup: Pada bab ini menjadi bab penutup dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Bab penutup akan berisi kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan dan saran untuk para aktor yang terlibat dalam ruang yang ada dan peneliti selanjutnya sehingga mendapatkan rekomendasi kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan seluruh sektor.

Intelligentia - Dignitas